



MINGGU PERTAMA | AGUSTUS

● TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 ●

Info Indonesia

Harga @Rp 20.000,-



Road to
Election
2024



**BAGIMU
CAPRESMU,
BAGIKU
CAPRESKU**

**MANTAN
KEPALA DAERAH
REBUTAN KE
SENAYAN**

**PARTAI BARU
BERJUANG
MENANGKAN KADER**

**PKB TETAP SETIA
KE GERINDRA**

AIRLANGGA- CAK IMIN DIGODA PUAN. ANIES MENGGODA SUSI

**BANGUN SINERGITAS
NETRALITAS ASN**

**TIDAK ADA
WACANA TUNDA
PILKADA**

**HAK PILIH
MARGINAL
RENTAN**

**AKSES SILON
KPU TETAP
TERBATAS**

**TUGAS KADES JAMIN
PEMILU AMAN**

**PEMROV BABEL
DUKUNG PENUH KPU**



LAHIR KEMBALI

Mundur satu langkah untuk maju seribu langkah. Begitulah kiranya yang bisa menggambarkan Info Indonesia yang kini kembali hadir menyapa masyarakat Indonesia dengan wajah baru.

Berawal dari media cetak harian dengan branding Koran Info Indonesia, hampir setahun lalu kami memutuskan untuk setop mencetak koran karena kerasnya tekanan media digital yang semakin berkembang.

Banyak media cetak bahkan yang sudah mempunyai nama besar akhirnya tumbang karena tak mampu bersaing dengan ketatnya media digital. Namun, Info Indonesia mencoba kembali menawarkan pemberitaan lewat media cetak yang berbeda dengan media digital.

Mengusung wajah baru, kini kami kembali dengan menghadirkan informasi melalui Tabloid Info Indonesia yang akan terbit mingguan setiap Senin.

Masih dengan motto "INOVASI UNTUK NEGERI", Tabloid Info Indonesia akan menghadirkan informasi-informasi terkini, khususnya seputar dunia perpolitikan di Tanah Air dengan sajian yang berbeda.

Terlebih, Indonesia saat ini memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Arus informasi dipastikan akan sangat beragam, termasuk berita-berita bohong atau hoax.

Untuk itu, Info Indonesia juga hadir untuk memberikan pencerahan dan menangkal berita-berita bohong tersebut agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Masih di bawah naungan PT. DUA SATU PRO, Tabloid Info Indonesia juga sudah memiliki Sertifikat Dewan Pers dengan Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022.

Dengan sudah terverifikasi Dewan Pers tersebut, maka bisa dipastikan informasi yang disajikan Tabloid Info Indonesia berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, tim Redaksi tabloid Indonesia juga dipastikan bekerja secara profesional menurut Kode Etik Jurnalistik.

Bagi kami, masyarakat mutlak berhak mendapat informasi yang mengandung kebenaran. Tak hanya faktual, tapi juga bermanfaat dan bisa menjadi referensi terbaik dalam membuat keputusan-keputusan penting di tengah dinamika kehidupan.

Dalam semangat berinovasi dan menyebarkannya ke seluruh negeri, kami hadir untuk menyajikan pemberitaan berprinsip Faktual, Unik, Jernih dan Independen (FUJI).

Prinsip FUJI tercermin pada logo kami yang didominasi warna MERAH sebagai simbol "SEMANGAT" dan PUTIH yang berarti "JERNIH".

Kami juga berkomitmen untuk segenap tenaga turut menjaga kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Kami tidak bekerja untuk kepentingan politik golongan tertentu dan bersikap nonpartisan. Kami mengharamkan informasi yang mengandung hoax, kebencian dan SARA.

Semua pihak yang menjadi objek pemberitaan berhak mendapatkan porsi pemberitaan yang berimbang.

Info Indonesia melarang setiap wartawan menerima imbalan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang berkaitan dengan tugas jurnalistiknya.

Semoga Tabloid Info Indonesia bisa menjadi referensi bagi masyarakat di Tanah Air untuk mendapatkan informasi yang benar, faktual, dan dari perspektif yang berbeda.

Salam,
Redaksi Tabloid Info Indonesia

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



JOKOWI BERNYALI EVALUASI MENTERI
•Kemungkinan Kecil Berujung Reshuffle

JAKARTA - Menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut pro-kontra. Lebih-lebih, situasi krisis ekonomi tahun depan mengharuskan semua menteri kabinet untuk lebih fokus pada tugas utama di pemerintahan.

Menurut MK, menteri yang mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatannya sepanjang dia mendapat persetujuan dari presiden dan mengundurkan diri atau menandatangani surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebelum menjabat sebagai menteri.

Amir Pukuan Nomor 68/PUU-2022 dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Uman, dalam sidang pada Senin (31/10/2022). Sidang digelar berdasarkan permohonan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin oleh Puan Maharani (PUI) dan Puan Maharani (PUI) dan Puan Maharani (PUI).

"Menteri yang mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri sebelum menjabat sebagai menteri," kata dia.

Amir Pukuan Nomor 68/PUU-2022 dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Uman, dalam sidang pada Senin (31/10/2022). Sidang digelar berdasarkan permohonan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin oleh Puan Maharani (PUI) dan Puan Maharani (PUI) dan Puan Maharani (PUI).

"Menteri yang mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri sebelum menjabat sebagai menteri," kata dia.

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



MENTERI NGEGET NYAPRES MUNDUR DARI SEKARANG

JAKARTA - Tidak bisa ditutupi, makin hari kian kentara siapa saja menteri yang ngeget mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi sendiri sudah meyakini-want-want mereka yang tidak fokus bekerja karena konsentrasi mereka justru ke urusan persidangan. Masalahnya, siapa mah di etika sudah lama raih dari nurani para pejabat.

Menariknya, gelagatan Jokowi atau sosok terdapat jumlah menteri yang menduduki jabatan menteri untuk kepentingan ekonomi para menteri yang dinilai mencolokkan diri di Pilpres 2024.

Kemudian, mengutip para menteri itu agar mengundurkan diri sebelum menjabat sebagai menteri. Bahkan, beberapa menteri yang mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri sebelum menjabat sebagai menteri.

Amir Pukuan Nomor 68/PUU-2022 dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Uman, dalam sidang pada Senin (31/10/2022). Sidang digelar berdasarkan permohonan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin oleh Puan Maharani (PUI) dan Puan Maharani (PUI) dan Puan Maharani (PUI).

"Menteri yang mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri sebelum menjabat sebagai menteri," kata dia.

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung **PT. DUA SATU PRO** Sertifikat Dewan Pers Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan
PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono
WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Nofri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martho Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir
EDITOR & GRAFIS : Al Amin, Achilles
TATA LETAK : Sujatmiko
MEDIA SOSIAL: Haidir Ali
KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida
SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah
PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba
ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina
DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %
 1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-
BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur
ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
TELP 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126 **TELP** : 0711-7442344



“Majelis Ulama Indonesia siap membuat situasi aman, nyaman, kepenak, enak. Jadi enggak usah takut menghadapi pemilu”

KH Marsudi Syuhud

BAGIMU CAPRESMU, BAGIKU CAPRESKU

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia agar memilih pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang terbaik. Terbaik menurut Kiai Ma'ruf adalah yang sesuai hati nurani masing-masing.

calon,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini juga berpesan kepada umat agar saling menghargai perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Menurutnya, jangan sampai perbedaan membuat umat terpecah.

“Pemilihan umum saya sering katakan supaya kita menjaga, mengawal, jangan sampai perbedaan partai, perbedaan capres itu membuat kita (terpecah), apalagi sesama Majelis Ulama. Ini saya kira tidak boleh,” tegasnya.

Ma'ruf pun menggunakan istilah yang ada dalam surat Al Kafirun dalam menyikapi perbedaan tersebut. Menurutnya, adanya ayat Lakum dinukum waliyadin yang artinya ‘Bagimu Agamamu, Bagiku

Agamaku’ sebagai prinsip toleransi juga bisa disesuaikan dengan pilihan politik.

“Sering saya katakan, ya sudah kita menggunakan kaidah lakum capresukum wa lana capresuna, bagimu capresmu bagiku capresku. Lakum partaiyukum wa lana partaiyuna. Kalau kita dengan agama sudah bisa begitu. Apalagi soal capres, lakum capresukum wa lana capresuna,” terangnya.

“Saya kira kalau begitu sudah insya Allah, kita akan melalui insya Allah pemilihan umum yang akan datang (dengan damai), pemilihan presiden, wakil presiden, walaupun sampai sekarang calonnya belum ada,” sambung Wapres.

Ma'ruf juga berharap akan ada Ketua MUI yang kembali terpilih menjadi pemimpin bangsa seperti dirinya. “Mudah-mudahan (saya) ketua umum yang jadi wapres bukan yang terakhir. Mudah-mudahan ya. Ini bagian penting bahwa ketum MUI juga bisa menjadi Wapres,” ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf juga menegaskan dirinya masih menjadi bagian dari MUI. Meskipun saat dipilih wapres, dia masih menjabat ketua umum MUI.

“Saya masih bagian daripada Majelis Ulama Indonesia. Karena saya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, jadi saya juga ikut bersyukur. Dan ketika saya dipilih jadi Wakil Presiden, saya juga masih Ketua Umum MUI. Karena itu, marilah kita jadikan milad ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT,” ujarnya.

Dia juga menekankan Milad MUI menjadi momentum untuk memperkuat langkah-langkah perbaikan umat. Dia mengingatkan visi MUI untuk yakni melayani umat (khadimul ummat) dan menjadi mitra pemerintah (shadiiqul hukumah).

“Kita enggak boleh keluar dari rel ini ya. Karena itu, MUI
i t u

sering saya katakan sebagai kereta api, enggak bisa dibawa ke mana-mana, dia berjalan di atas relnya, enggak bisa. Jadi, kalau orang yang mau ikut MUI, ikut relnya kalau ingin tidak ikut rel ini kereta banyak gerbongnya, mau sendiri, mau membawa arus sendiri, jangan naik kereta api, jangan naik MUI, naik taksi saja,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan umat di tengah keberagaman. Ma'ruf mengatakan, kesatuan umat merupakan syarat mencapai keberhasilan bangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, juga menyinggung soal pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 2024. Dia menyatakan MUI siap membantu menghadirkan situasi yang aman dan nyaman.

Dia mengatakan, kebijakan politik bertujuan mengkomposisikan dan memprogramkan, sehingga MUI siap membantu membuat program ke depan. Saat ini, ada sekitar 67 organisasi keagamaan yang telah hidup bersama-sama.

“Ketika bergerak dari pusat sampai daerah di situasi apapun, di situasi politik apapun, insya Allah, Majelis Ulama Indonesia siap membuat situasi aman, nyaman, kepenak, enak. Jadi enggak usah takut menghadapi pemilu,” ujar Marsudi.

Marsudi juga berharap khidmah MUI untuk bangsa dan umat dapat terus ditingkatkan bersama-sama. Saat ini, MUI telah melaksanakan roda organisasi dengan standar ISO.

“Alhamdulillah terus berjalan dan di-upgrade hari demi hari,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Marsudi juga menyinggung soal fatwa-fatwa yang telah dihasilkan MUI yang dalam hal ini khususnya Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI selama ini telah menetapkan fatwa tentang masalah keyakinan dan aliran keagamaan, dan juga terkait dengan ibadah. Komisi Fatwa telah memutuskan 19 fatwa di bidang keyakinan dan aliran keagamaan.

“Jadi enggak usah gugup dan gagap ketika ada macam-macam aliran yang bisa diputuskan oleh MUI,” kata dia.

Terkait ibadah, ada lebih dari 50 fatwa termasuk sholat berjamaah di masa pandemi. Adapun yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya, Komisi Fatwa telah memutuskan lebih dari 50 fatwa.

“Di bidang produksi makanan, obat-obatan, kosmetik, ilmu pengetahuan dan teknologi, Komisi Fatwa telah menetapkan lebih dari 50 ribu fatwa. Dan keputusan membukakan kehalalan ini semua, alhamdulillah kerja keras sebagai warisan amal sholeh yang ditinggalkan oleh para pengurus pendahulu kita,” terangnya.●

“Nanti kalau sudah muncul calonnya, nah pilih yang terbaik ya. Terbaik menurut siapa? Ya

menurut masing-masing kita ya. Caranya bagaimana? Minta fatwa pada hatimu, hati nuranimu itu lho siapa yang terbaik itu, itu saya kira,” ujar Ma'ruf saat menghadiri Tasyakur Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu, 26 Juli 2023.

Namun demikian, kata Wapres, hingga saat ini belum ada satu pun pasangan calon yang sudah pasti karena belum didaftarkan resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, calon yang ada saat ini baru sebatas kandidat.

“Ini baru bakal calon. Calonnya sendiri belum ada. Jadi kita (kalau) ditanya bagaimana soal anu (capres-cawapres), saya kira kita tunggu saja. Urusan calon itu urusan partai politik dan gabungan partai politik, itu urusan



“Ini tentu soal merapihkan atau merapatkan barisan koalisi. Ya ajak mengajak lah agar PKB dan Golkar bisa berkoalisi dengan PDIP”



Ujang Komarudin

AIRLANGGA-CAK IMIN DIGODA PUAN

PDIP bergerak cepat untuk mengonsolidasikan kekuatan menjelang Pemilu 2024, termasuk menemui para elite partai politik. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengunjungi kediaman dua ketua umum partai dalam satu hari. Mereka ialah Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Puan mengatakan pertemuan yang dilakukannya bukan hanya untuk mencari cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Namun, Puan menyebut pertemuan ini juga untuk menyambung silaturahmi.

Selain itu, dalam silaturahmi yang digelar 27 Juli 2023 itu tujuannya untuk bertukar pikiran dan saling menjajaki keinginan satu sama lain. Dia berharap tidak ada miss komunikasi antara PDIP dengan PKB dan Golkar.

“Jangan sampai ada miskom. Boleh saja kita ada beda pilihan, tetapi jangan sampai kemudian itu membuat komunikasi yang ada jadi tersendat pula,” ungkap Puan.

Puan mengakui pemilihan cawapres memang tidak dapat lepas dari pertemuan-pertemuan politik. Meski begitu, dinamika politik tetap harus berjalan.

“Kita akan umumkan cawapres-cawapres pada bulan November itu waktunya masih panjang, yang penting silaturahmi bagaimana kemudian pengumumannya itu November, pendaftarannya itu Okto-

ber. Namun, kami berharap jangan sampai ada salah komunikasi ya. Kita bangun komunikasi itu jadi pesta demokrasi yang gembira. Rakyat senang, nyaman damai,” kata Puan.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku Megawati Soekarnoputri telah menugaskan Puan untuk bertemu PKB dan Partai Golkar dalam rangka konsolidasi untuk Pemilu 2024.

“PDI Perjuangan ini sejak lahirnya inklusif, kami partai yang mewakili, merepresentasikan seluruh kekuatan politik menjadi representasi dari rakyat Indonesia,” kata dia.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan, partainya memiliki banyak persamaan dengan Partai Golkar. Bahkan, pertemuan antara Puan Maharani dan Airlangga Hartarto menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim teknis yang bertugas untuk membahas peluang kerja sama antara PDIP dan Golkar. Namun klaimnya, Golkar akan bergabung dalam pengusungan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Menurut Said, tim teknis akan merumuskan peta jalan kerja sama kedua partai agar lebih konkrit. Hasil rumusan dan kesepakatan tim teknis untuk selanjutnya dimintakan persetujuan pimpinan PDIP dan Partai Golkar sebagai dasar pijakan pengikatan kerja sama keduanya.

“InsyaAllah kerja sama kedua partai tak lama lagi akan segera disepakati pimpinan kami masing-masing dan akhirnya sebagaimana kawan-kawan parpol yang sudah bekerja sama dengan PDI Perjuangan, maka DPP Golkar dan PDI Perjuangan akan deklarasi bersama,” ujar Said, Jumat, 28 Juli 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng, mengatakan, nantinya tim teknis tersebut akan membahas peluang kerja sama keduanya untuk Pemilu 2024. Hingga saat ini Partai Golkar masih melihat dinamika politik yang terjadi jelang kontestasi nasional. Namun, tentunya ia berharap segera adanya keputusan partai terkait Pilpres 2024.

“Targetnya (untuk memutuskan

sikap) si ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Supaya publik tenaga, negara tuh tenang, berkompetisi dengan sehat, dengan gembira seperti yang Pak Jokowi sampaikan,” ujar Mekeng.

“Kita (tim teknis) dibuat intens itu untuk membicarakan hal detail, namanya kerja sama itu kan harus bisa dijabarkan cukup detail. Apakah kerja sama di tingkat pusat saja atau sampai ke provinsi segala macam, itu kan harus dibicarakan,” ujar Mekeng.

Seusai kunjungan Puan, elite PKB mengaku bimbang atas masa depan koalisi politik menuju kontestasi Pilpres 2024. Apalagi, koalisi PKB bersama Gerindra hingga kini masih belum sampai.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, pihaknya menghormati piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra. Namun, hal tersebut tak menutup peluang kerja sama dengan PDIP.

Selama 11 bulan berkoalisi, KKIR tak kunjung mengumumkan bakal capres dan cawapres yang akan diusungnya. Harapannya, adanya godaan dari PDIP tersebut membuat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto segera mengambil keputusan untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, ada banyak pertimbangan yang membuat KKIR belum juga mengumumkan pasangan capres-cawapres yang akan diusung. Namun hingga saat ini, PKB mendorong Muhaimin maju pada Pilpres 2024.

Godaan dari PDIP kepada PKB diharapkan jadi salah satu poin pertimbangan agar KKIR segera mengambil keputusan. Mengingat koalisi dengan Partai Gerindra itu sudah terjalin hampir setahun.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan, pertemuan Puan Maharani dengan Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto ingin mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pil-

pres 2024.

“Ini tentu soal merapihkan atau merapatkan barisan koalisi. Ya ajak mengajak lah agar PKB dan Golkar bisa berkoalisi dengan PDIP, pasti arahnya ke sana,” kata Ujang.

Dia menilai, untuk meraih kemenangan penting, PDIP perlu membangun kerja sama politik dengan banyak partai. Semakin banyak partai yang bergabung, maka kekuatan PDIP akan sulit di bendung.

Ujang menyampaikan, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebagian sudah merapat ke PDIP yakni PPP dan PAN. Kedua partai itu telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Menurutny, Golkar juga akan mendukung Ganjar Pranowo.

“Kelihatannya juga bisa saja mendukung Ganjar, karena kemungkinan di tekan oleh PDIP dalam konteks permasalahan dugaan kasus CPO di Kejaksaan,” tutur Ujang.

Sementara itu, PKB juga mulai dirayu oleh PDIP untuk bisa bergabung dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. “Kalau Cak Imin dirayu agar keluar dari Gerindra. Sebab kita tahu bahwa Cak Imin sedang bermanuver agar bisa menjadi cawapres Prabowo,” kata Ujang.

Maka dari itu, PDIP mencoba mencari momentum agar PKB mau ikut dalam gerbong koalisi yang nantinya akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Sampai sekarang (status Cak Imin) belum ada kejelasan, makanya digoyang-goyang, ditarik-tarik agar masuk barisan PDIP,” ujarnya.

Pengamat politik, Yusfitriadi, menilai, hal ini jadi salah satu langkah Cak Imin menegur Prabowo Subianto. Menurutny, Cak Imin sudah sangat mungkin lari dari KKIR jika tidak dijadikan cawapres oleh Prabowo. Indikasi itu sudah terlihat dari banyak pernyataan-pernyataan Muhaimin jika membahas posisi cawapres dari KKIR.

Namun, ia merasa, langkah Muhaimin atau PKB nyaris tidak mungkin ke KPP atau menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Karenanya, pilihan berpindah ke koalisi PDIP dan menjadi cawapres Ganjar Pranowo sangat terbuka.

“Apalagi, banyak yang masuk (bursa cawapres) Prabowo selain Cak Imin. Cak imin tentu berkepentingan dekati PDIP sebagai antisipasi, termasuk jika tidak dijadikan cawapres oleh Prabowo,” kata Yus.

Ketua Visi Nusantara Maju itu melihat, langkah ini menjadai bentuk daya tawar Muhaimin ke Prabowo. Muhaimin seperti mengingatkan Prabowo kalau mudah saja bagi PKB berpindah ke PDIP kalau tidak mendapat cawapres.

“Ini merupakan gaya yang sama dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, ketika menemui Puan Maharani, walaupun muatan politisnya berbeda. Sebab, berbeda ke Anies, Presiden Jokowi tampak menerima saja sosok Prabowo,” ujar Yus.

Dari sisi Puan, ia mengingatkan, PDIP saat ini belum memiliki koalisi yang kuat. Kehadiran PPP sekalipun dalam rangka mendukung Ganjar Pranowo dan bukan berkoalisi dengan PDIP.

“Kalau sampai pada satu titik PDIP sendiri, dampaknya tidak sederhana, bisa terjadi pembangkangan publik, delegitimasi dan lain lain,” kata Yus. ●





“Kandidat cawapres Anies itu kan lintas gender, bebas kasus hukum dan berpengalaman di pemerintahan”

Hermawi Taslim

ANIES MENGGODA SUSI

Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, pelan tapi pasti terus melakukan penjajakan sosok yang bakal menjadi pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Susi Pudjiastuti kini disebut-sebut jadi sosok calon wakil presiden (cawapres) yang cukup ideal.

Isu Anies bakal menggandeng mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu muncul bukan tanpa alasan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diketahui sengaja mendatangi Susi Pudjiastuti di kediamannya di Pangandaran, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023.

Anies berkunjung ke rumah Susi berselang sepekan setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga menemui wanita yang khas dengan jargon “Tenggelamkan” itu pada Senin, 17 Juli 2023, setelah menjalani sejumlah kegiatan di Pangandaran.

Anies mengatakan Susi Pudjiastuti merupakan sahabat lamanya. Sehingga, pertemuan antara keduanya tak lagi canggung. Dia lantas menjelaskan kegiatannya selama berkunjung ke kediaman Susi. Dia mengaku ngobrol banyak hal, pergi ke pantai, dan bermalam di rumahnya.

“Selama pandemi beliau kan lebih kebanyakan di sini, kemarin datang. Ngobrol banyak hal, bermalam di rumahnya, diajak ke pantai, diskusi banyak hal dan obrolan teman lama apa aja dibahas,” kata Anies, Selasa, 25 Juli 2023.

Anies juga mencicipi masakan yang disajikan Susi berupa makanan seafood dan olahan ikan lainnya. Selain menyantap makanan, ia juga menyempatkan diri bermain dengan cucu dari Susi.

Isu Anies akan memilih Susi menjadi cawapres disambut dengan pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang menyebut kandidat pendamping mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di Pilpres 2024 bisa laki-laki ataupun perempuan. Namun, pihaknya tetap menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Anies.

“Kandidat cawapres Anies itu kan lintas gender, bebas kasus hukum dan berpengalaman di pemerintahan. Kita mendorong semua anak bangsa yang beritikad baik bagi pengabdian untuk nusa dan bangsa,” ujar Hermawi.

Hermawi memandang kedua tokoh itu sebagai negarawan muda yang memiliki idealisme untuk memajukan Indonesia. “Keduanya juga mempunyai persamaan yang sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa mengimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini,” ujarnya.

Hal berbeda disampaikan Deputy Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani,



yang mengatakan pertemuan Anies dengan Susi tak ada kaitannya dengan pembahasan calon pendamping Anies di Pilpres 2024.

“Tidak selalu pertemuan antara Mas Anies dengan tokoh-tokoh lainnya dimaknai sebagai pembahasan (bakal) cawapres,” kata Kamhar, Rabu, 26 Juli 2023.

Menurut dia, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi biasa karena memang keduanya pernah duduk bersama sebagai pembantu Presiden Jokowi.

Pengamat politik sekaligus juru bicara Anies, Hendri Satrio, berpendapat, Anies bisa saja memilih Susi sebagai cawapres. Pasalnya, Anies dan Susi memiliki beberapa kecocokan.

Ia merasa, jika mencari sosok yang berani, yang jelas harus tidak mudah lari dari gelanggang bila ada usaha-usaha mengganggu pencalonan. Sampai hari ini, memang tidak banyak

tokoh yang terlihat berani bersama Anies. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, terlihat sering bersama.

Maka itu, ia merasa, kebersamaan Anies dengan Susi jadi menarik perhatian. Selain berani, Hensat merasa, Anies-Susi turut memiliki chemistry yang sudah terbangun sejak lama. Susi juga sering berkomunikasi dengan Anies. Bahkan, ada banyak angrek saat Hensat ke markas Susi di Pangandaran pemberian dari Anies.

“Maka, pertemuan kemarin saya melihat lebih dari sekadar antara dua tokoh, tapi pertemuan antara sahabat dan

chemistry-nya sudah ada-

pat,” kata Hensat, Rabu, 26 Juli 2023.

Selain itu, sosok Anies dan Susi memang memiliki kesamaan visi terhadap kelestarian hidup. Menurut Hensat, kesamaan visi tentang lestari tersebut tampak dari keaktifan keduanya dalam isu lingkungan.

Ia mengingatkan, Anies sudah sering disebut oleh lembaga perlindungan lingkungan sebagai calon presiden yang sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan, baik lembaga perlindungan nasional maupun internasional.

Sedangkan, Susi sudah sering melakukan hal-hal baik untuk lingkungan, seperti bersih-bersih pantai dan Pandu Laut Nusantara. Terlepas dari itu semua, Hensat merasa, pertemuan itu memancing penasaran publik.

Publik tentu semakin penasaran terkait siapa yang akan dipilih oleh Anies untuk bersanding di 2024. Sebab, seluruh rakyat Indonesia menantikan itu.

“Kalau saya pribadi beropini dipilih atau tidaknya Bu Susi nanti, setidaknya bila menjadi ketua timses Anies, tentu akan menarik,” kata Hensat.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut bila Susi dijadikan bakal cawapres Anies akan ditolak oleh Partai Demokrat. Sebab, sampai saat ini, elektabilitas Susi juga masih rendah.

Selain itu, Susi juga tidak tergabung dengan partai mana pun. Sementara, Anies merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS.

“Paling tidak dua syarat itu menjadi penting. Tidak mudah untuk bisa memampatkan kedua bakal capres itu dengan Bu Susi. Jika bersama Anies, Partai Demokrat pasti akan marah. Begitu pula kalau merapat ke Prabowo, PKB juga tidak mau,” kata Ujang, Kamis, 27 Juli 2023.

Ujang menjelaskan, terdapat sejumlah alasan sehingga Susi menjadi magnet politik bagi bakal capres seperti Prabowo dan Anies. Susi memiliki basis yang kuat setidaknya di kalangan nelayan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan pendobrak.

Tak hanya itu, Susi juga dinilai memiliki sokongan finansial yang kuat, sehingga beberapa parpol melirikinya untuk dijadikan bakal cawapres. “Semua ini membuat Bu Susi seakan menjadi magnet politik yang bisa saja digadang-gadang jadi cawapres ataupun paling tidak tim sukses,” katanya. ●





MANTAN KEPALA DAERAH REBUTAN KE SENAYAN

Beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan akan mengakhiri masa jabatan yang sudah dijalani selama dua periode. Setelah pensiun sebagai kepala daerah, beberapa dari mereka masih berhasrat untuk mempertahankan posisi politiknya di masyarakat.

Di Sumatera Selatan setidaknya ada enam kepala daerah yang akan mengakhiri jabatan yang sudah diemban selama dua periode, yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten OKU Selatan, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten PALI, dan Kota Prabumulih.

Setelah pensiun para wali kota dan bupati ini mencoba mempertahankan karir politiknya selama ini dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di DPR RI, calon gubernur dan wakil gubernur.

Dari beberapa kepala daerah ini setidaknya ada tiga orang yang secara tegas memilih berkarir di parlemen sebagai caleg DPR. Mereka adalah Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe; Wali Kota Palembang, Harnojoyo; dan Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar.

Bupati PALI, Heri Amalindo, secara tegas memfokuskan diri maju sebagai calon Gubernur Sumsel di Pilgub 2024. Sedangkan, Bupati OKU Selatan, Popo Ali, dan Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya, belum bisa dipastikan apakah ikut pencalegan atau bersaing di Pilgub Sumsel 2024.

Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, mengaku progres pencalonannya menjadi anggota DPR terus berproses. Saat ini namanya sudah didaftarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah

satu caleg DPR RI.

Selama ini, Prana Putra Sohe dikenal sebagai kader Partai Golkar. Namun, kemudian dia memilih berlabuh ke PKB dan menjadi caleg DPR asal Dapil I Sumsel.

Prana mengungkapkan, dirinya sudah masuk dalam Silon dan berdasarkan ketentuan KPU, pejabat bersangkutan harus mundur 13 hari sebelum penetapan DCT.

“DCT itu keluar 4 November. Aku 18 September sudah selesai, jadi tak perlu mundur,” ujarnya.

Prana optimistis akan lolos ke Senayan dari Dapil 1 Sumsel meski persaingan yang dihadapi juga tidak mudah. Dia juga punya basis suara yang kuat di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas serta Musi Rawas Utara. Melalui tiga daerah ini, dia yakin meraup suara maksimal dan berhasil lolos DPR.

Selain para pendatang baru yang basis massa juga kuat, Prana juga harus mampu menaklukkan sejumlah incumbent seperti Kahar Muzakir, Edi Santana, Siti Nurizka, Rizki Aprilia, Hafiz Tohir, Fauzi Amro, Mustafa Kamal, dan Ishak Mekki.

Bupati OKI, Iskandar, secara resmi menyampaikan pengunduran diri dan berhenti dari jabatannya periode 2019-2024 yang akan berakhir pada 15 Januari 2024. Surat pengunduran diri sebagai kepala daerah ini disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI, Kamis, 4 Mei 2023.

Pengunduran diri tersebut bagian dari rencana Iskandar yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju sebagai calon anggota DPR. Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan pemenuhan syarat administrasi sebagai bakal caleg.

Ketua DPRD OKI, Abdiyanto, membenarkan perihal adanya surat permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai kepala daerah oleh Iskandar. Mereka juga akan memproses surat pengajuan pengunduran diri Iskandar sesuai mekanisme yang berlaku. Iskandar rencananya mencalonkan diri sebagai caleg PAN dari Dapil 2.

Iskandar mengatakan, pengunduran



tersebut dilakukan dikarenakan dirinya melakukan pendaftaran sebagai caleg DPR pada Pemilu 2024. Sementara, akhir masa jabatan Bupati OKI terpilih 2019-2024 terhitung pada 31 Desember 2023.

“Perlu saya sampaikan bahwa pengunduran diri merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1),” katanya.

Sebagai Bupati OKI dua periode, basis suara Iskandar tentu banyak didukung warga Ogan Ilir dan Kabupaten OKI.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, sudah mendatangi Mapolda Sumsel untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) sebagai syarat pendaftaran sebagai caleg DPR. Masa jabatan periode kedua Harnojoyo sendiri akan habis pada 20 Oktober 2023.

Harnojoyo akan maju sebagai caleg dari Partai Demokrat di Dapil I Sumsel yang meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Lubuklinggau, dan Musi Rawas.

Keputusan tersebut juga menjawab rasa penasaran masyarakat pada Harnojoyo apakah dia ikut dalam pemilihan legislatif atau ikut mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada 2024 mendatang. Harnojoyo ternyata lebih memilih berkarir di dunia politik sebagai anggota DPR daripada terlibat persaingan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel. ●





“Kami ingin ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan warga Sumsel agar lebih mandiri”

Febuar Rahman

PARTAI BARU BERJUANG MENANGKAN KADER

Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang sudah ada di depan mata tak ingin dilewatkan oleh partai-partai baru di Indonesia. Dengan semangat baru dan kader-kader berkompeten, partai-partai baru mengobarkan kepercayaan diri untuk bisa membawa kemenangan kader-kadernya yang dicalonkan.

Partai Perindo yang merupakan besutan konglomerat Hary Tanoesoedibjo, mempunyai strategi khusus untuk bisa merebut kemenangan di Pileg 2024. Di Bumi Sriwijaya, Partai Perindo dikawal oleh Febuar Rahman selaku Ketua DPW Sumsel dan Yuseva selaku Sekretaris DPW Sumsel.

Partai berlambang burung garuda bersayap merah biru ini sudah mempersiapkan kadernya untuk menjadi bakal calon legislatif (caleg) yang siap dan mampu bertarung di Pileg 2024.

Latar belakang pendidikan dan ilmu politik yang baik, kapasitas yang mumpuni serta kemampuan teknis yang tak diragukan lagi, membuat para calegnya diyakini mampu merebut kursi parlemen, termasuk bisa melenggang ke Senayan.

Beberapa kader Partai Perindo yang siap bertarung merebut kursi daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1 yakni Andi Asmara, Rasyid Maratim, Suez Amir, dan Mustafa Kamal. Sedangkan, di dapil Sumsel 2, mereka yang akan bertarung yakni Ike Julies Tiati dan Irjen Pol (Purn) Zulkarnain Adinegara.

Zulkarnain Adinegara adalah sosok yang tak asing bagi masyarakat Sumsel. Dia pernah menjabat sebagai Kapolda Sumsel masa periode 2017-2020. Di masa jabatannya, Zulkarnain berhasil memecahkan banyak kasus kriminal dan menekan angka kriminalitas di Sumsel.

“Saya sendiri mencalonkan menjadi bacaleg dapil Sumsel 2 meliputi Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI),” ujar Febuar Rahman kepada Info Indonesia, Kamis, 27 Juli 2023.

Kendati masih jadi anak bungsu di deretan partai-partai besar, Febuar yakin kader-kader Partai Perindo bisa mencapai target Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibyo, yakni 10 persen suara atau 80 kursi dari seluruh dapil se-Indonesia.

Di Sumsel, Partai Perindo Sumsel mendapatkan target minimal 1 kursi di tiap dapil. Untuk dapil provinsi dan kabupaten/kota, ditargetkan mampu mendapatkan sembilan kursi di Pileg 2024.

Ada banyak keunggulan Partai Perindo dibandingkan partai lainnya untuk mendapatkan hati masyarakat. Seperti pendekatan para bakal caleg ke masyarakat dengan track record yang baik, serta



rutin menggelar kegiatan sosial agar masyarakat lebih dekat dengan Partai Perindo.

Bahkan, para kadernya juga banyak dari generasi milenial, sehingga suara-suara dari kalangan anak muda bisa terserap secara maksimal di Pileg 2024.

“Dari 2019-2024, programnya terus berjalan. Kalau partai-partai lain, hanya bergerak jelang pemilihan saja, tapi beda dengan kita. Partai Perindo terutama di Sumsel selalu hadir untuk masyarakat, melakukan pelatihan, pembinaan, penyaluran bantuan dan juga ada Kartini Perindo. Kami ingin ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan warga Sumsel agar lebih mandiri,” ujarnya.

Dengan jumlah kader Partai Perindo di Sumsel yang tembus di angka jutaan orang serta pendidikan politik yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, Febuar yakin kader-kader Partai Perindo Sumsel mampu meraih kemenangan di Pileg 2024.

Selain Partai Perindo, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pun optimistis bisa membawa kader-kadernya meraih ke-

menangan di Pileg 2024.

Sekretaris DPW Sumsel Partai Gelora, Amril Sudiono, mengatakan, banyak kader yang mencalonkan diri sebagai bakal caleg mempunyai track record yang baik.

Untuk di Dapil DPR Sumsel 1 yakni Yuswar Hidayatullah, Lesi Hertati, Emil Rosmali, Fran Fardariko, Sri Endah Suwardi, dan Anthony Marten. Sedangkan, Dapil DPR Sumsel 2 juga ada tiga nama yang lolos seleksi, yakni Erza Saladin, Asri dan Afrina.

“Alhamdulillah formasi bacaleg sudah disiapkan, termasuk bacaleg DPR RI. Seperti Yuswar Hidayatullah, yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Sumsel, Lesi juga pernah mencalonkan diri di DPD 2019, lalu Emil Rosmali yang dikenal sebagai owner Yayasan Al-Furqon Palembang,” katanya.

Semua bakal caleg yang siap melenggang ke Senayan mempunyai kompetensi yang tidak main-main. Meskipun sebagai partai baru dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sebanyak partai lainnya, kader-kader Partai Gelora Sumsel

akan membawa semangat dan perubahan baru bagi Indonesia.

Sosialisasi dan pendekatan menjadi hal utama dalam mengenalkan diri ke masyarakat Sumsel. Meskipun merupakan pengalaman baru bertarung di bursa politik dan belum ada beban sejarah, Partai Gelora akan terus membangun jaringan dan bekerja maksimal.

“Kita terus yakin dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kursi. Apalagi di Sumsel sudah ada sekitar 10 ribuan kader yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel,” katanya.

Partai Gelora juga mengenalkan tagline yang mendeskripsikan bagaimana partainya bisa membawa perubahan. Seperti ‘Arah Baru Indonesia’ dan ‘Indonesia Jadi Super Power Baru Dunia’.

Kader-kader Partai Gelora Sumsel juga berkomitmen untuk menjalankan politik bersih tanpa money politic yang sudah menjadi kebiasaan di setiap pemilihan umum. Dengan tagline tersebut, Partai Perindo mempunyai gerakan

atau visi yang jelas untuk Indonesia, termasuk Sumsel.

Amril juga menepis isu-isu miring yang beredar jika Partai Gelora bisa besar berkat bayang-bayang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kendati ada mantan kader-kader PKS yang bergabung ke Partai Gelora, namun jumlahnya tidak mendominasi.

Di Sumsel sendiri, mantan kader PKS hanya sekitar 30 persen dan sisanya diisi oleh wajah-wajah baru yang mempunyai visi misi yang sama dengan tujuan utama Partai Gelora. Dia tidak ingin Partai Gelora seperti dipolarisasi, seperti halnya PKS yang disebut-sebut masuk dalam polarisasi kanan.

“Kita tidak ingin terjadi polarisasi seperti itu, karena itu akan membuat negara tidak produktif dan efektif. Karena Partai Gelora berbeda dari PKS, kita mempunyai ide-ide sendiri untuk melakukan perubahan Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Amril mengungkapkan, dulu dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjajal peluang di pemilihan legislatif saat di PKS. Kali ini, Amril bisa berpeluang masuk dalam jajaran caleg Sumsel 1 untuk DPRD Sumsel. Terlebih dia sudah turun ke masyarakat, mendengarkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang belum dilirik oleh kader partai-partai lain.

Dia mencontohkan Palembang yang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas air bersih, pendidikan yang layak dan kesejahteraan yang baik. Dengan majunya dia sebagai wakil rakyat nantinya, Amril akan memastikan adanya perbaikan secara bersama-sama agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa seperti dijajah di negaranya sendiri. ●nefri/****



“PKB yakin Pak Prabowo dan Gerindra itu orang yang amanah, enggak akan khianat. Apalagi, Pak Prabowo sudah tau rasanya dikhianati”

Jazilul Fawaid



PKB TETAP SETIA KE GERINDRA

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diinisiasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra sudah terjalin 11 bulan lamanya. Namun, hingga ini kini belum mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

PKB sampai ini terus berupaya agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, bisa maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra juga terlihat tidak ingin terburu-buru mengumumkan secara resmi pasangan calon dari KKIR.

Meski KKIR belum mengumumkan pasangan yang bakal dimajukan di Pilpres 2024, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tidak mempermasalahkannya. Bahkan, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut Prabowo Subianto dan Partai Gerindra merupakan teman koalisi yang setia. Sebab, sampai saat ini masih konsisten bersama PKB.

“Salut sama Pak Prabowo, teman koalisi yang setia,” kata Cak Imin dalam acara Harlah PKB ke-25 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 24 Juli 2024.

Saat disingung mengenai waktu pengumuman capres dan cawapres dari KKIR, Cak Imin tidak ingin mengungkapkankannya. Dia meminta seluruh pihak untuk bersabar karena masih



dalam pembahasan di internal koalisi.

Cak Imin juga mengaku tidak boleh banyak bicara mengenai Pilpres. Pembahasan mengenai koalisi antara PKB dan Gerindra juga telah diamanatkan kepada pengurus DPP.

“Tunggu pengumuman, saya enggak boleh ngomong (mengenai capres-cawpres). (Soal nominasi) nanti-nanti, tergantung nanti,” jelas Cak Imin.

Cak Imin sebagai ketua umum PKB seperti juga mendapatkan godaan dari partai politik lain seperti PDIP. Pada saat Harlah kemarin, Cak Imin diajak untuk bergabung dengan koalisi PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Mendapatkan ajakan tersebut, Cak Imin tidak ingin menjawabnya secara gamblang. Sebab, saat ini, PKB sudah bersama Partai Gerindra. Terkait dengan keputusan koalisi, Cak Imin menyerahkannya kepada pengurus DPP PKB.

“Saya ngikut DPP, nanti tergantung pengurus DPP,” jelas Cak Imin.

Kendati begitu, Cak Imin mengungkapkan bahwa PKB memiliki hubungan dengan banyak partai politik, khususnya dengan PDIP. Dia mengatakan memiliki hubungan sangat dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.

“(PDIP dan PKB) Bukan hanya dekat, tapi nempel.

Jika ada kemungkinan bersama, hanya takdir yang mampu menjawabnya,” ujar Cak Imin.

Ketua DPP PDIP,

Puan Maharani, yang hadir dalam Harlah ke-25 PKB membenarkan bahwa PDIP dan PKB sangat dekat. Bahkan, kerap kali menjalin kerja sama politik dalam kontestasi Pemilu.

“Dari dulu PDIP dan PKB itu seperti saudara. Kami selalu bersilaturahmi, selalu mencocokkan visi dan misinya. Itu sudah dilakukan dari zaman dulu,” terang Puan.

Puan juga mendoakan PKB di Pemilu Serentak 2024 dapat memegang amanah dari masyarakat seluruh Indonesia. “Semoga menjadi partai yang menjadi wakil rakyat pada Pemilu yang akan datang,” tutur Puan.

Ketua DPR itu juga mengatakan

kepada seluruh masyarakat, meski di 2024 berbeda pilihan, namun kebersamaan harus tetap di jaga. “Walaupun nantinya akan ada perbedaan pilihan dalam Pemilu, tetap ingat bahwa kita semua punya satu tujuan, yaitu demi Indonesia maju. Perdamaian harus diutamakan,” jelas Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yakin bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak akan mengkhianati Cak Imin.

“PKB yakin Pak Prabowo dan Gerindra itu orang yang amanah, enggak akan khianat. Apalagi, Pak Prabowo sudah tau rasanya dikhianati,” ujar Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2023.

Dia menyebutkan bahwa PKB dan Partai Gerindra acapkali melakukan berbagai pertemuan untuk membahas koalisi dan pasangan calon dari KKIR. Jadi, Jazilul meyakini bahwa PKB dan Partai Gerindra tidak akan saling mengkhianati satu sama lain.

“Akan mengkhianati PKB enggak mungkin, itu sudah diomongkan bolak-balik di berbagai forum,” ujar Jazilul.

Dia menyampaikan, jika Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 tidak mengikutsertakan Cak Imin sebagai pendamping, maka sama saja mengkhianati PKB. “Kalau keputusan akhirnya tidak kemudian menyertakan Gus Muhaimin ya itu artinya berkhianat,” kata Jazilul.

Kata Jazilul, Partai Gerindra selalu menyampaikan, penentuan pasangan calon dari KKIR ada di tangan Cak Imin dan Prabowo Subianto.

“Bahwa dalam koalisi KKIR yang pegang kunci Inggris, yang pegang kartu prioritas, yang menentukan cawapres itu Gus Muhaimin,” tegas Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan, PKB dan Gerindra sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Keduanya sudah saling berkomitmen untuk terus bersama dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

“Hati PKB dan Gerindra suda tidak bisa dipisahkan,” kata Habiburokhman.

Partai Gerindra juga tidak mempermasalahkannya jika PKB melakukan silaturahmi politik dengan partai lain.

Menurut Partai Gerindra, itu merupakan hal yang sangat positif dalam membangun hubungan baik dengan siapapun.

“Dalam konteks menjalin silaturahmi antara anak bangsa supaya Pemilu-nya guyub, rukun, aman, damai,” terang Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, koalisi PKB dan Gerindra ini sudah pada tahap yang menyangkut perasaan kebatinan. “Koalisi ini soal psikologis, soal hati, soal batin, kami dan PKB tidak mungkin dipisahkan,” tegas Habiburokhman. ●





“Presiden sangat menghormati dan memahami mekanisme organisasi Partai Golkar, khususnya terkait pergantian kepemimpinan”

Abu Rizal Bakrie

Munaslub Partai Golkar

GAJAH VERSUS GAJAH

Desakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Partai Golkar terus bergulir. Kader partai berlambang pohon beringin dari beberapa daerah kini secara terang-terangan mendukung rencana munaslub untuk mendongkel Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang dituding tidak berhasil memimpin partai beringin.

U sulan Munaslub Partai Golkar bermula dari tiga ormas pendiri Partai Golkar yang meminta Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

Dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, 12 Juli 2023, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Lawrence TP Siburian, menyebut tidak masalah Airlangga Hartarto menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

Namun, Airlangga Hartarto diminta menyerahkan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan bahkan meningkatkan perolehan suara yang diraih pada Pemilu 2019, yakni 14 persen.

Bergulirnya wacana Munaslub ini semakin kencang pasca Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi crude palm oil (CPO). Tidak hanya itu, bahkan ada isu yang berkembang bahwa Airlangga Hartarto akan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

Walaupun elite-elite partai membantah isu itu, tapi wacana tersebut tetap bergulir di tataran kader daerah. Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Krey, mengatakan, sejak awal kader-kader dari Sumatera sampai Papua tegas mendukung nama Airlangga Hartarto sebagai capres, baik di Rapimnas maupun Rakernas.

Namun, ia menerangkan, dalam perjalanan semua melihat tren. Sebab, Max merasa, hari ini mereka sudah tidak bisa lagi mengangkat Airlangga sebagai

capres dan itu sudah disadari kader Golkar secara nasional.

“Tapi, teman-teman di daerah ini takut bicara saja, ketika mereka bicara langsung dicoret dari nomor DCT untuk jadi DPR,” kata Max, Kamis, 27 Juli 2023.

Ia mengungkapkan, atas kondisi seperti itu kader-kader di daerah memilih tetap mengangkat nama Airlangga di publik. Walaupun, Max meyakini, semua kader di daerah kalau secara internal sepakat meminta Munaslub.

Apalagi, jika kader-kader ini sedang berada di DPR atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tentu, Max melihat, semuanya ketika ditanyakan di publik akan ketakutan untuk bicara.

“Kita saja mau diskusi diancam, apalagi mereka yang sedang ada di dewan dan ingin jadi dewan lagi, bisa saja nomor, nama, hilang,” ujar Max.

Menurut Max, kondisi itu yang membuat kader-kader di daerah tidak akan berani membicarakan, apalagi mendukung pelaksanaan Munaslub. Sekalipun, ia meyakini, ketika ada yang menyuarakan Munaslub mereka akan setuju.

Terlebih, jika melihat kondisi elektabilitas Partai Golkar yang semakin hari terus mengalami penurunan.

Tidak cuma di daerah-daerah, tapi elektabilitas Golkar menurun secara nasional. “Karena kita sudah turun, Partai Golkar secara nasional sudah turun persentasenya,” kata Max.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengajak seluruh kader menolak tegas wacana munaslub untuk mengganti Air-

langga Hartarto. Ical mengapresiasi seluruh pengurus DPD Golkar tingkat I dan II tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Airlangga serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021.

Selaku Ketua Dewan Pembina yang terpilih secara aklamasi pada Munas 2019, Ical mengaku selalu berkomunikasi dengan Airlangga Hartarto sekaligus memonitor perkembangan terkini Golkar.

Ical mengatakan desakan munaslub yang disampaikan beberapa kader adalah langkah kontraproduktif yang bertujuan melemahkan Golkar menjelang Pemilu 2024.

“Saya mengimbau kepada seluruh kader Golkar bersatu dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyukseskan tugas-tugas pemerintahan sampai 2024 dan melakukan konsolidasi partai di segala lini untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden,” ujarnya.

Ical meminta kader menghormati keputusan Munas Golkar 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapimnas Golkar 2021 bahwa Munas digelar pada 2024.

Ical juga menyarankan agar Airlangga sebagai mandataris Munas Golkar 2019 terus melanjutkan komunikasi dan lobi dengan para pimpinan partai politik lainnya. Hal itu sebagai ikhtiar untuk merealisasikan amanat munas berkenaan dengan pencalonan presiden dan atau wakil presiden di Pilpres 2024.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu menyambut baik kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke ke-

man Airlangga pada Kamis, 27 Juli 2023.

“Saya menyambut baik kunjungan silaturahmi PDIP di bawah pimpinan Puan Maharani dan berharap agar sambutan hangat Ketua Umum Airlangga berupa seikat ‘bunga kuning merah’ dapat berlanjut ke tingkat yang lebih riil dalam membangun Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan aman,” ujarnya.

Selain itu, Ical menyampaikan apresiasi atas pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan tidak ikut campur dengan urusan atau dinamika internal Golkar.

“Presiden sangat menghormati dan memahami mekanisme organisasi Partai Golkar, khususnya terkait pergantian kepemimpinan,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai dinamika yang terjadi di Partai Golkar menjelang Pemilu 2024 seperti pertarungan politik antar gajah versus gajah.

Menurut Ujang, Golkar sebagai ajang adu kekuatan politik untuk memastikan dukungan partai berlambang pohon beringin itu di Pilpres mendatang.

“Ini adalah sebuah pertarungan politik ya gajah-gajah di luar yang ingin katakanlah menjadikan Partai Golkar adu kekuatan, apakah Airlangga bisa diganti atau tidak,” kata Ujang, Jumat, 28 Juli 2023.

Ujang menilai isu Munaslub yang terus menguat dari internal Golkar setelah Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi CPO terus digalang segelintir pihak. Hal ini dilihat dari pernyataan sejumlah elite Partai Golkar.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, juga menyatakan siap menjadi ketum Golkar.

“Artinya sangat jelas, sangat klir, isu munaslub itu bukan sekadar isu kelihatannya, memang kegiatan yang sudah dirancang untuk mengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar,” ujarnya.

Ujang pun melihat ada beberapa kemungkinan mulai dari Golkar atau Airlangga yang ingin merapat ke Koalisi Perubahan seperti pemberitaan sejumlah media, atau ke Koalisi PDIP mendukung Ganjar demi mengamankan kasus hukum Airlangga di Kejaksaan Agung atau justru ke koalisi Prabowo. ●



“Saya ingatkan kawan-kawan kepala desa agar tidak terlibat sebagai pelaksana kampanye saat Pemilu 2024, karena ada unsur pidananya”



Totok Hariyono

TUGAS KADES JAMIN PEMILU AMAN

Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut kepala desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan. Kades dinilai bisa langsung merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Kades juga bisa mendengar langsung keluhan masyarakat hingga ke pelosok negeri yang ada di desa tempatnya dinas.

“Para kades juga langsung merasakan dan mendengarkan keluhan masyarakatnya di desanya,” kata Al Haris saat membuka secara resmi Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Gedung Balairung Universitas Jambi, Rabu, 26 Juli 2023.

Rakernas Apdesi 2023 diikuti ribuan kepala desa beserta perangkatnya. Hadir pula sejumlah pejabat pusat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam kesempatan itu, Al Haris berharap peserta yang hadir dapat melihat dan merasakan kehormatan dan keindahan Provinsi Jambi. Ia juga yakin akan lahir rekomendasi-rekomendasi penting untuk pembangunan Indonesia.

“Pada forum yang mulia ini para kades yang kami cintai sekalian bisa bersilaturahmi di Jambi, bertemu dan nanti juga ada hasil Rakernas yang merupakan

rekomendasi-rekomendasi penting untuk perbaikan-perbaikan di negara yang kita cintai ini,” sebut Al Haris.

“Sepanjang Rakernas ini kita bersama membangun persepsi dan tema kita adalah Desa Kuat untuk Indonesia yang Menjaga Bangsa. Temanya kita buat begitu, pertama kita akan menghadapi Pemilu 2024,” sambungnya.

Dia menilai tugas kepala desa berat mulai tahun ini. Sebab, tahun depan sudah masuk pemilu dan kepala desa harus bisa menjamin bagaimana kondusifitas daerah masing-masing.

“Tugas kades itu berat. Mereka mesti men-jaga -

min bagaimana kondusifitas daerahnya masing-masing dan kita harus berhasil ketika pemerintah memutuskan

pemilu serentak, maka pilihan kita adalah kades mengamankan agar daerahnya aman, damai dan kondusif,” terang Al Haris.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan seluruh kepala desa untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye saat Pemilu 2024.

“Saya ingatkan kawan-kawan kepala desa agar tidak terlibat sebagai pelaksana kampanye

nye saat Pemilu 2024, karena ada unsur pidananya,” kata anggota Bawaslu, Totok Hariyono.

Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 280 ayat 2 dan 3 UU 7/2017 yang menjelaskan bahwa pelaksana tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dia menjelaskan, jika ada kepala desa yang terlibat aktif sebagai pelaksana kampanye pada pemilu dikenakan tindakan pidana sesuai dengan Pasal 494 UU 7/2017. Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Untuk itu, pihaknya berharap agar kepala desa dan seluruh perangkat desa dapat menjaga netralitas selama kampanye Pemilu 2024.

Totok menilai, keberhasilan demokrasi di desa tidak terlepas dari peran AP-DESI sebagai ujung tombak pemimpin masyarakat desa. Figur AP-DESI dibutuhkan dalam menciptakan pemilu yang aman, nyaman dan demokratis.

Selain itu, dia juga menegaskan kepada kepala desa yang ingin menjadi calon perseorangan atau menjadi peserta pemilu wajib mengundurkan diri dari jabatan kepala desa atau perangkat desa.

Ketentuan tersebut itu sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Totok menegaskan, pemilu bukan saja menjadi hajat Bawaslu, tapi menjadi hajat seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa AP-DESI, pelaksanaan pemilu yang aman di desa tidak mudah terjadi karena kepala desa juga menjadi ujung tombak tereslinggarannya pemilu yang aman.●



Antisipasi Konflik Jelang Tahun Politik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan antisipasi terjadinya konflik jelang Pemilu 2024. Masyarakat diajak agar dapat saling menjaga dan menghormati perbedaan pendapat atau pilihan untuk menghindari suasana-suasana yang tidak kondusif menjelang 2024.

“Artinya dengan pilihan masing-masing, dengan tidak memahami atau kurang memahami kondisi

yang ada, itu akan menjadikan gesekan-gesekan yang jika dibiarkan secara terus menerus, maka akan menjadi persoalan juga,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau, Raja Hery Mokhrizal, di Batam, Kamis, 27 Juli 2023.

Hery mengatakan, melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pihaknya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kepri agar dapat secara bijak menanggapi isu-isu politik yang tersebar di media sosial, terutama terhadap pemberitaan hoaks.

Hery menyampaikan, Badan Kesbangpol bersama Dinas Kominfo juga bekerja sama untuk melakukan filterisasi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak benar adanya.

“Dari semua elemen diajak untuk bergerak mengedukasi dalam hal beda pendapat maupun pilihan adalah hal biasa dalam suasana demokrasi,” ujar dia.

Dengan begitu, pihaknya berharap upaya antisipasi yang dilakukan tersebut tidak terjadi di Kepri, terutama di

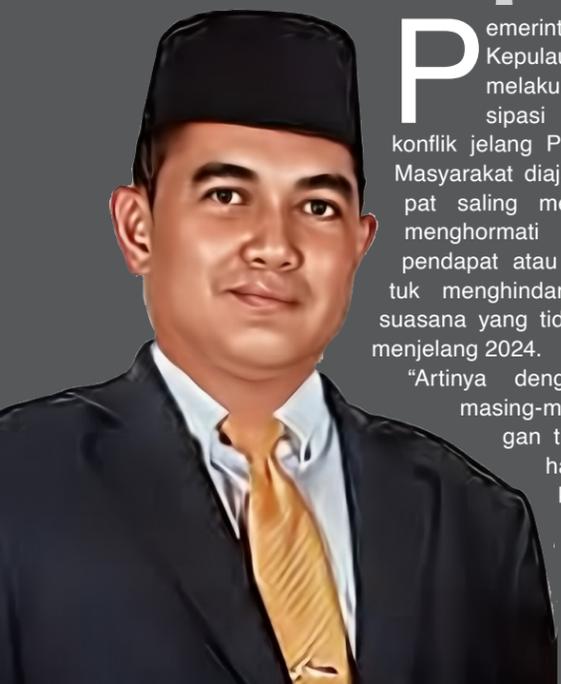
Kota Batam yang memiliki penduduk paling banyak.

“Itu yang kami harapkan tidak terjadi perselisihan gesekan di lapisan masyarakat, terutama di Batam yang penduduk hampir 1,1 juta dari total penduduk Kepri 2,1 juta,” kata Hery.

Sebelumnya, Pemprov Kepulauan Riau menganggarkan Rp198 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hery mengatakan untuk anggaran KPU dan Bawaslu masing-masing Rp141 miliar dan Rp57 miliar. Sementara, untuk anggaran pengamanan Polda Kepri, Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, dan TNI dari 3 matra (Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara) masih dalam proses pengajuan.

“Total keseluruhan sekalian sama tim pengamanan sekitar Rp198 miliar. Polda Kepri sudah mengajukan sekitar Rp11,4 miliar dan Korem sekitar Rp2 miliar. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum, biasanya di bawah Rp500 juta,” kata Hery.●





“Kami menyadari tidak dapat bekerja sendiri dalam men-sukseskan agenda Pemilu 2024”

Mohamad Ihsan

SIAPKAN CADANGAN RP250 MILIAR SUKSESKAN PEMILU-PILKADA 2024

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran Rp250 miliar dalam pos dana cadangan untuk pembiayaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di luar anggaran non-cadangan sekitar Rp492,6 miliar.

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan, mendapat tugas mandatory menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Kita sudah punya perda-nya untuk dana cadangan (APBD 2023) itu,” kata Al Muktabar saat menjadi pembicara pada Webinar Mingguan Pemantapan Koordinasi Kesiapan Penganggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 27 Juli 2023.

Al Muktabar menjelaskan, penyiapan dana cadangan merupakan idenya sebagai bentuk tanggung jawab setelah dilantik menjadi penjabat kepala daerah.

“Salah satu tugas mandatory sebagai Penjabat Gubernur Banten adalah memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan persoalan mendasar adalah pembiayaan,” ujarnya.

Dia menyadari pilihan membentuk dana cadangan memiliki risiko. Namun, dia telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak soal itu dan menyatakan bahwa

pemilu merupakan program bersama yang sangat penting.

“Kami pun menunda beberapa program yang dinilai memiliki prioritas paling rendah karena semua yang sudah diprogramkan adalah prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, Al Muktabar bersama DPRD Banten menyepakati Perda 5/2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024. Dana c a d a n g a n Pemilu

dan Pilkada Serentak 2024 ditetapkan melalui APBD sebesar Rp250 miliar.

Kekurangan anggaran pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2024-2029 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan dialokasikan dalam APBD 2023 dan 2024. Adapun kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di Banten mencapai Rp742,6 miliar.

Anggaran sebesar Rp250 miliar dipenuhi melalui mekanisme dana cadangan dan sisanya sebesar Rp492,6 miliar melalui mekanisme dana non-cadangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Poldab Banten juga memperkuat koordinasi persiapan Pemilu 2024 yang ditandai den-

gan silaturahmi yang berlangsung di Mapolda Banten, Serang, Rabu, 26 Juli 2023. Kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi mengenai persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Wakil Kapolda Banten, Brigjen Pol M Sabilul Alif, memberikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan KPU Banten. Menurut Sabilul, peran KPU sangat penting dalam menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Banten.

“KPU adalah salah satu instansi yang berperan penting sebagai penyelenggara dalam agenda Pemilu 2024,” ujarnya.

berharap dengan adanya silaturahmi dan penguatan koordinasi ini dapat lebih mempererat hubungan komunikasi dalam menghadapi agenda Pemilu 2024.

Ketua KPU Banten, Mohamad Ihsan, mengatakan, kedatangan KPU ke Mapolda Banten juga untuk menindaklanjuti rapat koordinasi sebelumnya bersama Forkopimda Banten terkait kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kedatangan kami hari ini selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk menindaklanjuti rapat koordinasi bersama Forkopimda Banten,” kata Ihsan.

KPU, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menyukseskan perhelatan politik pada 2024. KPU Banten membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Poldab Banten dari sisi pengamanan Pemilu.

“Kami menyadari tidak dapat bekerja sendiri dalam men-sukseskan agenda Pemilu 2024, perlu adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi,” katanya.

Adapun tahapan Pemilu 2024 yang sedang dilakukan KPU Banten yakni sedang melakukan verifikasi administrasi perbaikan kebenaran dan daftar ganda bakal calon anggota legislatif yang dimulai sejak 30-31 Juli 2023. ●



Pemprov Babel Dukung Penuh KPU

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Babel dapat mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 dengan matang guna men-sukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tahun depan.

“Tadi kami juga berbicara banyak hal terkait kontestasi pemilu 2024. Kami sama-sama mendorong Pilpres, Pilkada, maupun Pileg di Kepulauan Babel berjalan dengan baik,” kata Suganda di Pangkalpinang, Rabu, 26 Juli 2023.

Suganda mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel siap memberikan dukungan penuh kepada KPU. Sebab, KPU memiliki tugas penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di semua level untuk masa depan Indonesia, khususnya di

Kepulauan Babel.

Dia mengharapkan rangkaian pesta demokrasi tahun depan, baik itu Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024, maupun Pilkada Serentak pada 27 November 2024 dapat dipersiapkan oleh KPU dengan matang.

Sementara itu, KPU Kepulauan Babel memaparkan tahapan serta jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 kepada Penjabat Gubernur Suganda.

Ketua KPU Babel, Husin, menyatakan setiap langkah tahapan pemilu Serentak 2024, mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu, jadwal penyelenggaraan, pertimbangan penetapan jadwal pemungutan suara serta komponen penyelenggaraan pemilu.

“Hingga saat ini, tahapan persiapan

pemilu 2024 di Kepulauan Babel, terlaksana dengan baik, saat ini proses pemilu telah masuk dalam tahapan verifikasi administrasi,” katanya.

Ia menyatakan bahwa mekanisme pengadaan logistik pada Pemilu 2024 tidak bersifat sentralistik. Artinya, tanggung jawab pengadaan logistik dibagi ke masing-masing Satuan Kerja (Satker) KPU.

“Jadi, nantinya semua pengadaan logistik dikerjakan oleh masing-masing KPU Provinsi. Tentunya, dampak dari ketentuan ini ialah beban kerja lebih ringan dan proses distribusi lebih efektif,” katanya.

Menurut dia, saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan kotak suara, sehingga keterlambatan kedatangan logistik diharapkan tidak terjadi saat Pemilu mendatang. ●





BANGUN SINERGITAS NETRALITAS ASN

Guna menjunjung tinggi netralitas menghadapi pemilu 2024, seluruh pejabat kepala daerah dari kalangan Aparatur Sipil Negara mengikuti rapat koordinasi tentang perumusan dan pematapan kebijakan terkait netralitas ASN di pelaksanaan Pilkada 2024.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Dirjen Otonomi daerah Kemendagri Akmal Malik dan seluruh kepala daerah dari kalangan ASN.

Dalam arahnya, Akmal Malik menekankan dua hal kepada para pejabat kepala daerah yakni menjaga kewenangan dan fasilitas yang dititipkan oleh negara agar jangan disalahgunakan.

Sesuai arahan presiden Jokowi Widodo, tugas pejabat kepala daerah adalah menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah pada saat terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah karena telah berakhir masa jabatannya.

Untuk meminimalkan adanya potensi upaya politisasi bagi para pejabat kepala daerah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada tahun 2024, mereka diimbau agar mempedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Ta-

hun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K 1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

“Jadi tujuan kita rakor ini untuk menyamakan persepsi terkait netralitas pejabat kepala daerah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” terangnya.

Selain itu, juga untuk meminimalkan



potensi adanya implikasi hukum atau tindakan oleh pejabat kepala daerah yang berkaitan dengan netralitas yang bersangkutan sebagai ASN.

Menyusun indikator yang baku sebagai pedoman hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat kepala daerah dalam konteks pelaksanaan tugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Menyikapi itu, Pejabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, menyatakan siap membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam wilayah Ka-

bupaten Musi Banyuasin dan menghasilkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

“Saya selaku pimpinan daerah Kabupaten Muba mendukung penuh rapat koordinasi ini dan berharap ASN dapat mengerti hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik pegawai,”

lapangan bisa saja tidak sadar melanggar netralitas itu, maka itulah pentingnya kegiatan ini untuk mengingatkan kembali,” terang Apriyadi.

Pada prinsipnya Kabupaten Muba berkomitmen penuh untuk tetap menjaga netralitas ASN menuju Muba zero konflik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Pihaknya juga siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Bumi Serasan Sekate. ●



Apresiasi Terobosan Apriyadi

Pembenahan dan evaluasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muba sejak satu tahun terakhir diakui berdampak masif secara langsung untuk masyarakat di Bumi Serasan Sekate.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat kunjungan ke Kabupaten Muba dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu.

“Pak Pj Bupati Apriyadi ini hebat. Satu tahun bisa turunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai dua digit,” ungkap Akmal Malik.

Dengan capaian-capaian tersebut, kata Akmal, tentu mandat yang diberikan Kemendagri kepada Apriyadi untuk menakhodai Pemkab Muba bersama OPD dinilai berhasil.

“Lakukan terus terobosan-terobosan sehingga dapat berdampak langsung ke masyarakat Muba,” ucapnya.

Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Barat tersebut mengaku, kerja keras yang



dilakukan Apriyadi bersama OPD tentu tidak mudah. Sehingga, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Akmal Malik juga mengingatkan kepada ASN Pemkab Muba untuk netral saat memasuki tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024.

“Jaga netralitas sehingga stabilitas kea-

manan daerah juga dapat terjaga,” jelasnya.

Sementara itu, Apriyadi Mahmud mengaku turunnya kemiskinan ekstrem di Muba dari 6,56 persen ke 4,74 persen tidak terlepas dari intervensi langsung OPD di lingkungan Pemkab Muba.

“Capaian itu tentu tidak bisa dipisahkan

dengan maksimalnya intervensi langsung rekan-rekan OPD yang saat ini sangat konsekn mengentaskan kemiskinan ekstrem,” urainya.

Mantan Kadinsos Sumsel ini menambahkan, mulai Juli 2023, Pemkab Muba mengucurkan alokasi anggaran Rp32 miliar yang akan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin ekstrem melalui program basic income.

“Mulai Juli nanti kita akan salurkan basic income langsung ke rekening masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Kita terus bekerja agar kemiskinan ekstrem di Muba dapat dituntaskan, dan masyarakat jadi mandiri,” ungkap dia.

Apriyadi mengatakan, persoalan stunting juga berhasil ditangani dengan baik dan berhasil mencatat penurunan hingga 5 persen dari 23,00 persen turun menjadi 17,07 persen.

“Persoalan stunting juga kita intervensi langsung melalui program Bunda AS. Jadi, kita siapkan juru masak untuk mengolah makanan khusus untuk anak-anak stunting di pedesaan, orang tuanya didampingi langsung dan programnya kita pantau langsung,” pungkasnya. ●



“Tidak pernah saya bawa organisasi yang saya pimpin untuk berpolitik”

Isran Noor

HINDARI FANATISME PARTISIPASI POLITIK

Pemerintah Kota Bandung menyebutkan bahwa 87 persen warganya telah berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada 2019. Angka tersebut diharapkan bisa meningkat saat Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari serta Pilkada pada 27 November tahun depan.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, menghimbau agar warga Bandung tidak melakukan golput atau tidak memberikan hak pilihnya.

Menurut Ema Sumarna, meskipun pada 2019 partisipasi mencapai 87 persen, harapan idealnya angka tersebut harus lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia ingin persentase partisipasi politik meningkat dan perilaku politik warga menjadi lebih baik.

Dalam pandangannya, terdapat tiga perilaku politik yang umum terjadi di masyarakat. Ema berharap agar warga Bandung lebih condong kepada perilaku politik partisipatori, di mana masyarakat mau melakukan penelitian tentang calon wakil rakyat dan memilih mereka secara aktif.

Ia menyayangkan apabila ada warga Bandung yang golput hanya karena merasa tidak ada calon pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.

“Saya menghimbau kita kan punya data yang bagus, pada 2019 sebanyak

87 persen. Tapi kita berharap idealnya besok harus lebih baik daripada kemarin. Persentase harus lebih tinggi dan perilaku yang jauh lebih baik,” kata Ema di Bandung, Kamis, 27 Juli 2023.

Ema menggambarkan perilaku politik lainnya yaitu parokial yang ditandai dengan sikap acuh tak acuh dan sering berujung pada golput. Ia mengingatkan bahwa meskipun tidak ada calon yang sempurna, pasti ada calon yang sesuai dengan nurani setiap individu.

Oleh karena itu, Ema menghimbau agar masyarakat tidak melakukan golput, meskipun hal ini tidak dilarang secara hukum, namun diharapkan dapat dihindari.

Selain perilaku parokial, Ema juga menyebut perilaku subjektif, di mana seseorang ikut-ikutan tanpa memiliki sikap yang jelas. Dia menegaskan, perilaku politik yang diharapkan adalah partisipatori, di mana masyarakat mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot calon serta melihat rekam jejak mereka secara bijaksana.

“Jadi imbauan saya jangan jadi

golput, walaupun tidak dilarang tapi saya ingatkan diharapkan jangan ada. Ada juga subjektif ikut-ikutan teu boga sikap, kumaha ramena wae. Nah, yang bagus itu partisipatori, dipikirkeun bibit bebet bobot, track record-nya kumaha,” ujar dia.

Ema menekankan pentingnya menjaga kondisi politik di Kota Bandung kepada ketua RW, ASN, dan seluruh komponen masyarakat, agar tetap kondusif dan menghindari fanatisme.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar, namun tetap harus menjaga ketertiban dan menghargai satu sama lain.

Ema mengingatkan bahwa kekerasan tidak boleh digunakan sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat.

Jika terjadi hal-hal yang rawan seperti itu, tindakan dari petugas keamanan akan diambil untuk menga-

tasi situasi tersebut.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat dengan tujuan menciptakan kenyamanan selama Pemilu 2024.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang proses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada dengan suasana yang aman dan kondusif.

Ema berharap dengan adanya pendidikan politik seperti ini, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi, menyatakan, kegiatan ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan iklim politik yang sehat selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada di Kota Bandung.

Kegiatan pendidikan politik tersebut diikuti oleh 201 peserta yang berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat RW, Kecamatan, hingga tingkat Kota Bandung. Hal ini menunjukkan komitmen dari berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses pendidikan politik demi menciptakan iklim politik yang lebih berkualitas dan kondusif.

Dengan adanya pendidikan politik ini, diharapkan masyarakat Kota Bandung dapat lebih memahami pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu dan Pilkada serta berkontribusi dalam membangun Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan menghargai nilai-nilai agamis. ●



Jangan Bawa Organisasi Berpolitik

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengingatkan para pengurus organisasi sosial maupun kemasyarakatan tidak membawa organisasi berpolitik.

“Setiap pribadi harus menggunakan hak politiknya, tapi jangan-

gan bawa-bawa organisasinya ikut berpolitik,” kata Isran Noor dalam pernyataan resminya, Rabu, 26 Juli 2023.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kaltim itu, siapa pun berhak untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bahkan presiden dan wakil presiden, termasuk calon kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota.

Namun, untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas politik dalam negeri, selayaknya organisasi apa pun tidak dilibatkan dalam perpolitikan.

Dia pun mencontohkan dirinya ketika memimpin organisasi para bupati atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), juga Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (Perhiptani) selama tiga periode.

Bahkan, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan di daerah memimpin Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman (IKA Unmul) dan Ikatan Alumni Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Timur (IA KPMKT). Termasuk menduduki posisi sebagai pembina atau pun penasehat dalam banyak organisasi kemasyarakatan di Kaltim.

“Tidak pernah saya bawa organisasi yang saya pimpin untuk berpolitik,” tegasnya.

Hal ini, menurut Isran, selain bentuk menjaga kondusivitas dan netralitas, juga bagaimana memberikan edukasi tentang berpolitik yang baik kepada masyarakat.

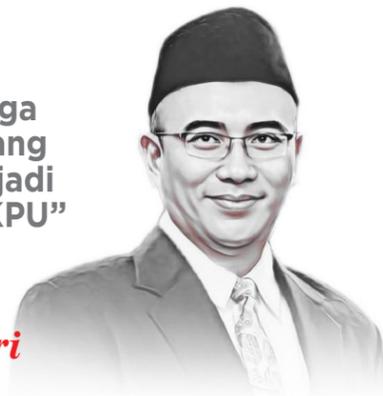
Saat ini, bangsa Indonesia sudah memasuki masa-masa pelaksanaan pesta demokrasi 2024, baik untuk Pilpres maupun Pileg, yang dilanjutkan Pilkada pada November tahun depan.

Pilpres dan Pileg diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan tahapan sudah dimulai sejak akhir Desember 2022, dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu serta penetapan peserta Pemilu 2024.

Sementara waktu pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada November tahun ini.

“Waktu-waktu ini menjadi sangat penting dan kritis,” kata Isran Noor. ●





Hasyim Asy'ari

AKSES SILON KPU TETAP TERBATAS

Permasalahan dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masih terus berlanjut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi tahapan Pemilu masih tidak beri akses seutuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengklaim bahwa pihaknya sudah sangat terbuka kepada Bawaslu terkait dengan akses Silon. KPU, kata dia, akan membuka Silon jika Bawaslu ingin meminta informasi mengenai data para calon anggota legislatif (caleg).

“Informasi apa yang ingin diperoleh Bawaslu kita buka,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Hasyim mengaku, KPU sudah memberikan surat balasan kepada Bawaslu terkait permintaan akses Silon. Hasyim menyampaikan bahwa KPU sampai saat ini masih menunggu tanggapan dari Bawaslu.

“Sudah kami kirimkan surat, sekiranya Bawaslu ada informasi atau data yang perlu dikonfirmasi. Kami persilakan menyampaikan supaya nanti kita tunjukkan,” jelas Hasyim.

Menurut Hasyim, KPU akan memberikan akses Silon untuk membantu Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi tahapan Pemilu.

“Misalkan ada temuan atau laporan tentang ijazah, karena pada dasarnya dalam pencalonan itu hubungan hukum adalah antara partai politik dan KPU. Ada temuan atau ada laporan, kalau ada laporan atau ada temuan missal indikasi ijazah palsu, lalu ingin mengetahui informasi itu di Silon pada KPU, ya kami buka,” kata Hasyim.

Dia mengatakan, pada tahapan pencalonan anggota legislatif yang bertanggung jawab penuh adalah KPU. Sebab, seluruh

syarat dari caleg dikirimkan kepada KPU sebagai panitia penyelenggara Pemilu.

“Dokumen persyaratan dan daftar nama bakal calon itu pemainnya adalah partai politik dan disampaikan kepada KPU,” terang Hasyim.

Terkait dengan informasi daftar caleg, kata Hasyim, KPU akan membukanya ke publik ketika pengumuman daftar calon sementara (DCS) dan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT).

“Nah, kalau sekarang ini, itu kan KPU juga terkait dengan berbagai macam instrument hukumnya antara KPU dan partai politik. Maka, KPU juga harus memegang apa yang menjadi kewenangan KPU,” ujar Hasyim.

Alasan KPU tidak bisa membuka informasi daftar caleg ini, kata Hasyim, karena pihaknya bertanggung jawab penuh terhadap data yang disampaikan partai politik. Apalagi yang menyangkut data pribadi.

“Ada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada Undang-Undang Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menjadikan KPU harus hati-hati.

Dokumen, informasi, data yang diserahkan kepada KPU, termasuk data pemilih juga begitu. Data pemilih ini, kan, sumbernya ada dari pemerintah,” jelas Hasyim.

Berkaca dari Pemilu 2019, kata Hasyim, tidak semua curriculum vitae (CV) milik caleg dapat diunduh. Sebab, untuk membuka informasi tersebut, KPU harus mendapat persetujuan dari pimpinan partai politik.

“Ada memang yang tidak ditayangkan, karena memang untuk menayangkan itu perlu persetujuan dari partai politik,” kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan, saat ini, KPU masih

menjalankan tahapan perbaikan daftar caleg. Sebab, KPU masih menemukan caleg yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, statusnya sebagai mantan napi korupsi yang hak politiknya masih dicabut oleh keputusan pengadilan.

Terkait status dari para caleg ini, nantinya KPU akan membukanya ke publik. Kata Hasyim, caleg yang diumumkan ke publik hanya yang memenuhi syarat.

“Iya pasti akan diumumkan statusnya, apakah memenuhi syarat, yang diumumkan yang memenuhi syarat saja ya. Yang tidak memenuhi syarat kan tidak diumumkan. Karena, namanya juga daftar calon, artinya yang tidak masuk kategori daftar calon kan tidak masuk,” jelas Hasyim.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengaku sudah mendapatkan surat dari KPU mengenai permintaan akses Silon. Sebelumnya, Bawaslu berencana untuk melaporkan KPU ke DKPP jika akses Silon masih tidak diberikan.

“Sudah ada balasan surat dari KPU,” kata Bagja di Gedung Bawaslu, Rabu, 26 Juli 2023.

Terkait rencana mengadukan KPU ke DKPP, Bagja belum bisa memberikan informasi lebih jauh. Sebab, pihaknya masih melakukan kajian terhadap surat dari KPU.

“Nanti dulu. Ada balasan surat dari KPU,” ucap Bagja.

Informasi yang didapatkan, surat yang disampaikan KPU itu menegaskan bahwa Bawaslu akan mendapatkan akses Silon jika mendapatkan temuan atau laporan dari masyarakat.

Terkait hal ini, Bagja menyampaikan, pihaknya akan sulit menemukan bukti awal jika akses Silon tidak diberikan seutuhnya oleh KPU. Padahal, Bawaslu berkewajiban untuk mengawasi tahapan pendaftaran caleg melalui Silon.

“Eenggak ada temuan awal kalau Silonnya enggak di buka,” jelas Bagja.

Dirinya mengaku permasalahan mengenai Silon ini juga pernah dibahas dalam forum Tripartit antara Bawaslu, KPU, dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam forum tersebut, Bagja menyampaikan jika ada persoalan masing-masing harus melakukan komunikasi.

“Sudah dua atau tiga kali pertemuan tripartit penyelenggara Pemilu. Kita menjaga sinergitas kelembagaan. Kalau jika ada hal yang bisa dibicarakan tentu kita bicarakan,” ucap Bagja.

Kendati sudah melakukan beberapa pertemuan, namun Bawaslu tetap mengalami kendala ketika ingin mengakses Silon. Sebelumnya, Bawaslu juga pernah mengirimkan surat imbauan kepada KPU sebanyak empat kali perihal permintaan akses Silon.

Namun, Bawaslu sampai saat ini belum memiliki rencana untuk melaporkannya ke DKPP. Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait permasalahan ini. Kata Bagja, Bawaslu sudah menentukan sikap tegas, namun belum bisa diinformasikan ke publik.

“Saya belum mendapatkan izin Pleno untuk ngomongin itu. Kalau di publis ke teman-teman nanti dulu. Oh iya (sudah ada sikap) tinggal diumumkan,” pungkas Bagja.●





“Kami berharap fokus kegiatannya diarahkan kepada perlindungan hak konstitusional kelompok masyarakat marginal rentan”

Pramono Ubaid Tanthowi

HAK PILIH MARGINAL RENTAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menjalin kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai pemenuhan hak politik kelompok rentan, seperti kelompok kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik dan wilayah perbatasan dengan negara lain.

“Kerja sama ini berhubungan dengan pemenuhan hak politik kelompok rentan, drafnya akan segera dibahas dan dipercepat agar segera disosialisasikan,” ungkap Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, saat menerima audiensi Komnas HAM di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.

Dia memberikan masukan untuk lebih memberikan fokus pengawasan kepada wilayah yang sering bermasalah, seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat.

“Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi pemantauan khusus pengawasan kelompok rentan dikarenakan menjadi salah dua daerah sebagai Indeks Kerawanan yang cukup tinggi,”

ungkap alum-nus Univer-

sitas Indonesia itu.

Bawaslu juga akan segera melakukan sosialisasi terkait kerja sama yang akan dilakukan. Sosialisasi ini direncanakan dilakukan pada saat pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Agustus 2023.

“Kerja sama ini perlu dipercepat agar bisa disosialisasikan kepada pengawas yang akan dilantik sebanyak 1.000 lebih pengawas pada Agustus mendatang,” ujar Bagja.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigi, menyampaikan, audiensi antara Komnas HAM dengan Bawaslu membahas mengenai hak konstitusional dari kelompok marginal rentan. Sebab, Pemilu Serentak 2024 akan segera berlangsung.

Kunjungannya ke Bawaslu kali ini sebagai bentuk komitmen kedua lembaga dalam memastikan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan inklusif. Selain itu, mengawal hak pilih seluruh masyarakat Indonesia.

“Dapat menjamin perlindungan, penghormatan dan HAM. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komnas HAM dan Bawaslu memiliki tugas dan fungsi kewenangan berbeda. Bawaslu secara spesifik memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujar Atnike.

Pendiri Yayasan Lokataru itu menyampaikan, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan HAM yang dimiliki masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu agar tetap terpenuhi.

“Dalam konteks hak politik, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi secara khusus,” terang Atnike.

Oleh karena itu, Komnas HAM secara khusus memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal rentan di Pemilu 2024. Kata dia, Pemilu yang diselenggarakan serentak pastinya memiliki kompleksitas.

Maka, Komnas HAM dan Bawaslu telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok marginal rentan. Seluruh masyarakat yang memiliki hak untuk memilih atau dipilih harus dilindungi.

“Komnas HAM memberi-

kan perhatian terhadap upaya-upaya pemajuan dan perlindungan dari hak kelompok rentan marginal dalam Pemilu,” ujar Atnike.

Dia menyampaikan, Komnas HAM dan Bawaslu akan selalu berkomunikasi jika ada pelanggaran yang terjadi pada gelaran Pemilu Serentak 2024. Jika Komnas HAM mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran HAM Pemilu, maka akan langsung diinformasikan kepada Bawaslu.

“Harus dikomunikasikan dengan baik antara Komnas HAM dan Bawaslu, karena kalau dari Komnas mungkin tidak ada masa kedaluarsanya. Tapi, kalau laporan itu masuk dalam proses penanganan ke Bawaslu ada masa kedaluarsanya,” ungkap Atnike.

Maka dari itu, Atnike menyebutkan pentingnya sebuah komunikasi antar lembaga. Sehingga, penanganan pelanggarannya akan berjalan dengan lancar. Komnas HAM juga akan memberikan informasi kepada Bawaslu jika terjadi pelanggaran HAM pada masa tahapan Pemilu Serentak 2024.

“Sehingga, tidak melanggar hukum acara penegakan hukum Pemilu itu sendiri,” imbuh Atnike.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, dalam audiensi itu, Komnas HAM dan Bawaslu membahas pemenuhan hak asasi konstitusional kelompok marginal rentan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pramono mengharapkan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi tahapan Pemilu, mengawal hak pilih seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami harapkan seluruh jajarannya melakukan pengawasan yang lebih ketat, lebih intensif, atas hak konstitusional warga negara kelompok rentan. Misalnya warga binaan di LP maupun rutan, warga panti jompo, lansia, panitia, dan masyarakat adat suku terasing. Lalu kemudian kelompok minoritas, pemilih pemula, perempuan, pekerja migran, dan lain-lain,” kata Pramono.

Mantan Anggota KPU Periode 2017-2022 ini juga mengharapkan, program-program yang dijalankan oleh Bawaslu bisa menasar ke para kelompok marginal rentan. Sebab, seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih

memiliki hak untuk memilih di Pemilu Serentak 2024.

“Kami berharap fokus kegiatannya diarahkan kepada perlindungan hak konstitusional kelompok masyarakat marginal rentan,” jelas Pramono.

Lebih lanjut, mantan Ketua Bawaslu Banten ini menyarankan kepada Bawaslu untuk melibatkan kelompok marginal rentan di setiap kegiatan pengawasan.

“Kami berharap teman-teman Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas hak konstitusional itu melibatkan dan memberdayakan pengawas dari kelompok mereka sendiri,” ujar Pramono.

Dia meminta kepada Bawaslu dalam merekrut pengawas di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa tetap melibatkan kelompok marginal rentan tersebut. Misalnya, panwaslu di daerah pedalaman harus melihat suku di wilayah tersebut.

Selain itu, dia berharap Bawaslu dapat memfokuskan kegiatan sosialisasi ke kelompok marginal rentan tersebut. Sebab, kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan informasi.

Dia menambahkan, Komnas HAM dan Bawaslu juga memberikan perhatian lebih terhadap hak konstitusional yang dimiliki penyandang disabilitas. Komnas HAM menekankan bahwa Bawaslu perlu metode yang berbeda untuk pendekatan dalam sosialisasi.

“Perlu diberi pendekatan sosialisasi lebih ramah disabilitas,” pungkas Pramono.●



“Kalau ditunda jadwal pilkada, maka harus mengubah UU Pilkada dan itu bukan persoalan ringan”



Yanuar Prihadin

TIDAK ADA WACANA TUNDA PILKADA

Komisi II DPR RI menegaskan hingga saat ini tidak ada wacana yang muncul, baik dalam pembicaraan resmi maupun tidak resmi antara DPR dan Pemerintah, terkait isu penundaan Pilkada Serentak 2024.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, meminta para penyelenggara pemilu untuk tetap fokus dan melaksanakan Pilkada sesuai dengan Undang-Undang (UU).

“Di DPR, khususnya Komisi II DPR RI, belum ada wacana ataupun pembicaraan resmi maupun tidak resmi terkait dengan penundaan, memundurkan, atau memajukan Pilkada 2024. Sesuai dengan UU Pilkada, bahwa Pilkada itu dilakukan bulan November 2024. Bahkan, hasil kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Mendagri, Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP, bukan hanya bulan yang ditetapkan, bahkan tanggalnya pun sudah ditetapkan, itu tanggal 27 November 2024,” terang Saan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.

Menurut Saan, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki wewenang terkait menunda ataupun memundurkan Pilkada 2024. Sementara, DPR dan Pemerintah sendiri tidak ada wacana terkait hal tersebut.

“Adapun yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, terkait Pilkada, yang berpendapat tentang menunda ataupun memundurkan Pilkada, menurut saya mereka itu adalah pelaksana UU. Jika di UU Pilkada itu dilaksanakan pada bulan November, selama tidak ada perubahan pilkada yang kewenangannya ada di DPR dan pemerintah, ya, laksanakan saja UU tersebut dan tidak perlu mewacanakan terkait memajukan maupun mengundurkan Pilkada,” tegasnya.

Saan mengingatkan, para penyelenggara pemilu adalah ujung tombak dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Maka sudah seharusnya para penyelenggara pemilu ini menjaga kondusifitas menjelang Pemilu, bukan malah memunculkan wacana-wacana yang berpotensi akan menimbulkan keaduan, baik di kalangan masyarakat maupun partai politik.

“Karena apa yang mereka wacanakan

itu pasti akan membuat suasana menjadi tidak pasti, apalagi tahun 2024 itu tahun politik, di mana bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi partai politik pun begitu besar bebannya. Dia (parpol) harus menyiapkan pilkada nasional, pilpres, pileg. Kemudian di waktu yang sama harus menyiapkan calon-calon kepala daerah untuk 38 provinsi di lebih 500 kabupaten kota dan itu menjadi beban tersendiri untuk parpol,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengaku siap menjelaskan terkait pernyataan usulan penundaan Pilkada 2024 kepada Komisi II DPR. Bagja mengatakan pernyataan tersebut sebetulnya bukan untuk meminta Pilkada ditunda.

“Ya monggo aja (kalau mau dipanggil), pertama kami tidak pernah ya membahas itu dalam statement resmi, itu nggak ada. Jadi jangan dipotong tiba-tiba penundaan,” kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.

Bagja menuturkan usulan penundaan Pilkada 2024 bukan usulan resmi dari Bawaslu. Selain itu, usulan itu disampaikan dalam rapat tertutup.

“Sebenarnya kalau dilihat itu statement sudah jelas, bahwa itu dalam rapat tertutup, bukan kemudian statement resmi lembaga bahwa Pilkada harus ditunda, itu tidak,” ujarnya.

Bagja menyebut dalam diskusi dengan KSP itu, pihaknya menjelaskan situasi permasalahan Pilkada dan langkah alternatif yang dapat dilakukan.

“Jadi penundaan itu bukan statement lembaga, dan juga dalam diskusi tersebut bukan hanya pembahasan mengenai alternatif, tapi juga kemungkinan bisa terjadi,” tuturnya.

Rencana memanggil Bawaslu ke Senayan sebelumnya diungkapkan Wakil

Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihadin, dan anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. Komisi II DPR sebagai mitra kerja Bawaslu ingin meminta penjelasan lengkap mengapa usul penundaan Pilkada Serentak 2024 yang kontroversial itu tiba-tiba mencuat.

“Ya pasti nanti pada waktunya, kita panggil, kita tanyakan. Itu pasti kita tanyakan, dulu saja KPU kontroversi begitu juga kita panggil, terus kita tanyakan, akhirnya kan clear,” kata Yanuar.

Sementara, Mardani menyatakan, selain memanggil Bawaslu, bahkan berencana melayangkan peringatan kepada Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam rapat Komisi II.

“Nanti (dalam rapat Komisi II), kami akan elaborasi alasan Bawaslu RI mengusulkan penundaan pilkada. Mungkin juga kami akan memberikan peringatan agar isu-isu besar seperti itu dikonsolidasikan terlebih dahulu, dikoordinasikan terlebih dahulu,” kata Mardani.

Baik Yanuar maupun Mardani jelas tidak setuju dengan usulan tersebut. Mereka menilai, usulan tersebut sama saja dengan mengotak-atik kesepakatan yang telah dibuat sejak jauh-jauh hari oleh DPR bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

Terlebih, UU 10/2016 tentang Pilkada telah lebih dulu memerintahkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia secara serentak dilaksanakan pada November 2024.

“Artinya kalau ditunda jadwal pilkada, maka harus mengubah UU Pilkada dan itu bukan persoalan ringan karena memerlukan persetujuan DPR dan pemerintah,” kata Yanuar.

Dari sisi substansi, Yanuar menyebut Bagja tak kredibel berbicara soal potensi gangguan keamanan sebagai alasan menunda pilkada. Persoalan tersebut merupakan domain Polri dan TNI. Dia pun menilai Bagja terkesan tidak percaya dengan kemampuan dan kesiapan TNI-Polri. ●





“Perlu dijadikan contoh pesta demokrasi Kamboja bagi negara di dunia, khususnya Indonesia yang mau memasuki Pemilu 2024”

Putu Supadma Rudana

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menyampaikan apresiasi terhadap seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung di Kamboja. Proses Pemilu di negara tersebut yang berjalan dengan lancar, tertib dan damai, di mana tidak ada insiden, pemaksaan atau hal-hal yang menonjol.



JAGA TRADISI PEMANTAUAN PEMILU ASEAN

“Kami menyaksikan rakyat Kamboja menggunakan hak politik mereka secara antusias, lebih dari 84 persen datang ke TPS,” ungkap Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon, usai diundang Pemerintah Kamboja menjadi observer internasional Pemilu Kamboja ke-7 di Phnom Penh, Minggu, 23 Juli 2023.

Melalui konferensi pers dan mewakili delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA), politisi Partai Gerindra tersebut juga menekankan bahwa kehadiran para observer, termasuk dari delegasi Parlemen anggota AIPA turut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, Fadli juga menggarisbawahi kerja sama dan hubungan Indonesia dan Kamboja harus tetap berjalan baik dan ditingkatkan melalui kerja sama antar Parlemen.

“DPR RI melalui BKSAP siap bekerja sama dengan siapapun yang akan menduduki kursi Parlemen Kamboja untuk meningkatkan kerja sama Parlemen dan hubungan Indonesia-Kamboja,” ujar Fadli.

Ke depannya, Fadli berharap tradisi pemantauan untuk terus diadakan di negara-negara lainnya, termasuk di kawasan ASEAN dengan mengundang perwakilan dari Parlemen anggota AIPA.

Fadli mewakili Parlemen ASEAN (AIPA) menyampaikan pernyataan dan tanggapan terkait observasi hasil Pemilu Kamboja. Fadli mengikuti proses pemantauan pembukaan di sejumlah TPS hingga proses perhitungan surat suara.

Parlemen Kamboja mengundang delegasi parlemen negara-negara ASEAN menjadi observer sesuai

kesepakatan saat ‘Parliamentary Preparatory Meeting pada ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting’ di Labuan Bajo pada Mei lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR, Putu Supadma Rudana, menilai pesta demokrasi di Kamboja berjalan dengan damai. Sehingga hal serupa patut dicontoh di Indonesia yang akan melaksanakan Pemilu pada 2024.

“Sebagai observer (peninjau) dari BKSAP Indonesia, saya melihat pemilu di Phnom Penh, Kamboja, hari ini sangat menarik. Pemilu mereka berjalan damai, suka cita, dan penuh riang gembira, sehingga perlu dijadikan contoh pesta demokrasi Kamboja bagi negara di dunia, khususnya Indonesia yang mau memasuki Pemilu 2024,” kata Putu.

Dia juga me-

nyebut bahwa sebanyak 9,7 juta pemilih yang mengikuti pemilu di Kamboja memaknai pesta demokrasi dengan bergembira, tanpa ada saling menghujuat.

“Pemilu itu maknanya pesta demokrasi. Jadi, semua gembira tidak saling menghujuat, tidak saling gontok-gontokan maupun saling fitnah. Meski banyak partai politik yang ikut berkontestasi, sekitar 18 partai untuk merebut 125 kursi parlemen,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar tak melihat besaran jumlah penduduk Kamboja yang mengikuti pemilu, melainkan melihat proses jalannya pemilu yang mampu dilaksanakan secara demokratis. “Kamboja ini termasuk negara yang tergolong muda, tapi mampu melaksanakan pesta

demokrasi secara demokratis sesuai dengan kearifan lokalnya, damai dan penuh gembira. Jadi, jangan melihat besar atau kecil jumlah penduduknya,” tuturnya.

Pada Pemilu 2018 di Kamboja, Putu menuturkan bahwa Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen kembali memenangkan pemilu, meski ada 17 partai politik yang menjadi peserta pemilu saat itu.

Menurut dia, Hun Sen yang memimpin Kamboja di usianya yang ke-70 tahun itu telah membawa negaranya mencapai status berpenghasilan menengah ke bawah dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Sektor manufaktur tekstilnya, terutama untuk merek-merek terkenal Barat, berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja vital. Sementara ekonomi tumbuh rata-rata 7,7 persen antara tahun 1998 dan 2019,” ucapnya.

Putu menambahkan, Hun Manet, putra dari Perdana Menteri Hun Sen, di gadang-gadang akan menggantikan tampuk kepemimpinan ayahnya pada Pemilu 2023. Dia menyebut bahwa Hun Manet yang merupakan lulusan akademi militer West Point Amerika Serikat saat ini menjadi jenderal bintang empat pada usianya yang ke-45 tahun.

“Di umur 45 tahun, Hun Manet saat ini Jenderal berbintang empat di Kamboja. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Lalu, Hun Manet juga mempunyai pendidikan tinggi dengan gelar master dari Universitas New York dan gelar doktor dari Universitas Bristol Inggris. Keduanya di bidang ekonomi. Dia melewati pendidikan ayahnya, bahkan di usia muda sudah sering bertemu pemimpin dunia, wakil pemimpin dan menteri luar negeri dari negara lain,” ungkapnya. ●



“Ketika dia terpilih, dia otomatis mengundurkan diri. Artinya sebelum masuk tahapan pemilu dia sudah mengundurkan diri. Sudah mengakhiri masa dinasnya”

Ahmad Ali



MUNDUR DEMI JADI ANGGOTA DEWAN

Sebanyak 44 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia tercatat mengundurkan diri demi menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Mereka terdiri atas gubernur, bupati, dan wakil wali kota.

Beberapa pertimbangan yang membuat mereka lebih memilih menjadi calon legislatif, di antaranya karena masa kekuasaan mereka yang sebentar lagi habis setelah menjabat dua periode. Ada juga yang memang merasa lebih nyaman sebagai politisi ketimbang kepala daerah serta beberapa alasan lainnya.

Di Banten, ada tiga kepala daerah yang mundur demi nyaleg. Mereka adalah Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya; Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi; dan Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin.

Para kepala daerah yang telah mengajukan surat pengunduran diri itu akan tetap menjabat seperti biasa sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nama mereka dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 pada 4 November 2023.

Mereka tidak diganti sampai ditetapkan sebagai caleg dalam DCT. Setelah penetapan DCT, maka gubernur, bupati, wali kota yang mundur akan digantikan oleh wakilnya. Kalau kepala daerah dan wakilnya sama-sama mundur demi nyaleg, maka Kemendagri akan menetapkan pelaksana harian (Plh) gubernur, bupati atau wali kota.

Lain halnya apabila wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota yang mundur. Kemendagri tidak akan langsung meminta pengganti atas para wakil kepala daerah itu. Kemendagri

akan mempertimbangkan sisa masa jabatannya.

Untuk diketahui, seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menggelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Sedangkan, Pilpres dan Pileg digelar pada 14 Februari 2024.

Adapun kepala daerah yang menyatakan mundur antara lain Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat setelah memutuskan maju sebagai caleg dari Partai Nasdem.

Masa jabatan Viktor Laiskodat sebagai gubernur akan berakhir pada 5 September 2023. Pengunduran diri Viktor Laiskodat dari jabatan Gubernur NTT disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Menurutnya, mundur dari jabatan merupakan syarat bagi kepala daerah yang nyaleg.

“Begini, pengunduran diri itu dibuat dalam rangka persyaratan pemenuhan caleg. Jadi sengaja lebih awal itu memang dipersyaratkan bahwa ketika orang sedang menjabat gubernur kemudian maju sebagai caleg dia harus membuat pernyataan pengunduran diri,” kata Ali.

Menurut Ali, Victor Laiskodat memang sudah berencana mundur dari jabatannya sebagai gubernur NTT.

“Ketika dia terpilih, dia otomatis mengundurkan diri. Bang Viktor itu akan menyelesaikan tugasnya sebelum pemilu. Jadi pada September 2023. September Oktober lah kurang lebih. Artinya sebelum masuk tahapan pemilu dia sudah mengundurkan diri. Sudah mengakhiri masa dinasnya,” katanya.

Ali menyampaikan, dengan surat pengunduran diri tersebut, maka ketika Viktor terpilih sebagai anggota DPR, dia otomatis mundur dari Gubernur NTT.

Sementara, salah satu bupati yang memilih mundur yakni Iskandar yang menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Iskandar yang menjabat Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel berniat menjadi anggota DPR dari Dapil 2 Sumsel setelah menjadi Bupati OKI selama dua periode dari 2014-2019 dan 2019-2024 yang masa jabatannya akan berakhir pada 15 Januari 2024.

Pengunduran diri tersebut bagian dari rencana Iskandar untuk maju sebagai calon anggota DPR, di mana pengunduran diri ini berkaitan dengan pemenuhan syarat administrasi sebagai bakal caleg.

“Perlu saya sampaikan bahwa pengunduran diri merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1),” katanya.

Sebagai Bupati OKI dua periode, basis suara Iskandar tentu banyak didukung warga Ogan Ilir dan Kabupaten OKI.

Mantan kepala daerah yang mencoba peruntungannya di DPR yakni mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang maju di Pileg 2024 lewat Dapil III Sumatera Utara.

Irwan Prayitno mengungkapkan, sebetulnya setelah menjabat Gubernur Sumatera Barat, dirinya sudah tidak mau lagi ikut dalam pertarungan politik karena Irwan ingin fokus untuk mengabdikan kepada partai.

“Saya sudah sampaikan untuk tidak lagi terlibat di pertarungan politik kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sehingga saya diberi posisi ketika itu sebagai Ketua Dewan Pakar DPTP PKS,” katanya.

Namun, DPTP PKS memutuskan punya kebijakan lain untuk Pemilu 2024 yaitu memanggil Irwan dan mantan kepala daerah lainnya untuk ikut.

“Jadi ada keputusan partai untuk memanggil mantan-mantan kepala daerah agar maju di calon legislatif. Hal ini untuk membantu daerah lain untuk dapat mendulang suara,” katanya.

Lalu, Irwan menjelaskan, DPTP PKS menetapkan dirinya untuk maju di Pileg Dapil III Sumatera Utara. Walaupun, banyak DPW lain yang ngotot untuk Irwan maju di daerahnya.

“Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau sangat ngotot agar saya maju di sana. Tetapi, DPTP berkata lain,” ucapnya.

Menurutnya, mantan gubernur maju di pertarungan pileg daerah lain sudah menjadi hal yang biasa. “Banyak kok mantan kepala daerah yang maju di Pileg dapil lain,” katanya.

Selain itu, sosok mantan kepala daerah juga akan sangat memudahkan partai untuk mengkampanyekan. Sebab, mereka sudah punya nama dan dikenal masyarakat.

“Ya, akan mudah mengkampanyekan, masyarakat sudah banyak yang kenal. Sehingga, Partai akan menjadi lebih gampang,” katanya.

Guna mengatur pesta demokrasi lima tahunan tersebut, KPU sudah menetapkan jumlah daerah pemilihan (dapil) serta jumlah kursi DPR untuk pemilu legislatif.

Terkait adanya pemekaran wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelum pemekaran hanya ada dua dapil di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian setelah pemekaran ada tambahan empat provinsi/dapil baru, yakni Papua Selatan, Papua tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Dengan demikian, saat ini terdapat enam provinsi/dapil di Tanah Cendrawasih. Jumlah dapil di Indonesia pun bertambah dari 80 menjadi 84 dapil, dan kursi DPR bertambah dari 575 menjadi 580 kursi untuk periode 2024-2029.

Adapun Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah dapil terbanyak pada Pemilu 2024, yakni masing-masing 11 dapil. Diikuti Jawa Tengah sebanyak 10 Dapil. Ada pula empat provinsi yang masing-masingnya memiliki tiga dapil, kemudian sembilan provinsi memiliki dua dapil, dan 22 provinsi lainnya hanya punya satu dapil. ●





“Semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas”

Munafrizal Manan

ISU MUSIMAN CALEG PARTAI GERINDRA

Prabowo Subianto sudah empat kali mencalonkan diri dalam kontestasi Pilpres, baik sebagai calon wakil presiden (cawapres) hingga calon presiden (capres), namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Di Pilpres 2024, Prabowo digadang-gadang akan kembali mencoba peruntungan sebagai capres dan menjadi pengalaman kelima kalinya.

Langkah Prabowo Subianto untuk menjadi capres di Pilpres selalu dibenturkan dengan isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk jelang Pilpres 2024.

Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa, kembali mengangkat isu puluhan tahun silam yang hingga kini masih menjadi misteri siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya para aktivis-aktivis Indonesia.

Pada 27 Juli 1996, para aktivis PRD, termasuk anggota dari organisasi-organisasi di bawahnya diburu pemerintah karena menjadi buronan politik. Bahkan, beberapa aktivis yang ditangkap, menjadi pesakitan dan sebagian dari mereka hilang tanpa jejak antara 1997-1998.

Dari data catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), ada sekitar 13 orang yang belum kembali hingga hari ini, di antaranya Wiji Thukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan dan Suyat. Bahkan, salah satu aktivis bernama Gilang ditemukan meninggal dunia pada 23 Mei 1998 di areal hutan di Magelang.

Beberapa waktu lalu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PRD, Petrus Hari Hariyanto, bersama rekan-rekannya kembali mengangkat isu pelanggaran HAM yang ditujukan ke Prabowo Subianto.

Dia menilai, Menteri Pertahanan tersebut harus bertanggung jawab atas penculikan dan hilangnya para aktivis di 1997-1998. Apalagi saat itu, Letjen Pangkostrad Prabowo Subianto dikeluarkan oleh ABRI, karena dianggap bertanggung jawab atas kasus penculikan bersama Tim Mawar Kopassus. Namun hingga kini, Prabowo Subianto tidak dinyatakan bersalah atau disidang.

“Kawan-kawan tetap berjuang, mengusahakan dan menginginkan kasus penculikan tidak dikubur, harus tetap diungkap.

Empat kawan kami harus ditemukan, karena keluarga mereka menanti dengan kesedihan dan air mata,” ucap Petrus.

Di tengah isu miring yang selalu menghantuinya itu, Prabowo Subianto juga banjir dukungan untuk menjadi capres di Pilpres 2024. Bahkan, dia disebut layak menjadi capres karena sosoknya sudah dikenal publik dan kepemimpinannya menjadi Menhan membuat Prabowo Subianto mendapat kepercayaan dari warga Indonesia.

Bahkan secara terang-terangan, Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut Prabowo di mata masyarakat sudah dipersepsikan sebagai capres bukan seorang menteri, karena kelasnya se-

dan Konstitusi, Munafrizal Manan, menilai, dengan memakai isu musiman itu malah akan semakin merendahkan marwah HAM itu sendiri. Karena nilai-nilai HAM sangat mulia dan tidak pantas untuk dijadikan kendaraan politik bagi yang tidak menyukai Prabowo Subianto.

“Menuduh seolah-olah seseorang sudah pasti bersalah padahal tidak ada putusan lembaga peradilan yang menyatakan seseorang telah bersalah secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan yang justru mencederai prinsip HAM,” ujar Munafrizal melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Juli 2023.

Dia berujar, semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin men-

main hukum dan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yuridis yang sangat kuat.

“Dalam hukum pidana, pembuktian hukum tidak boleh sedikitpun ada keraguan yang beralasan (beyond reasonable doubt), apalagi yang tidak beralasan, dan juga pembuktian hukumnya harus lebih terang daripada cahaya (in criminalibus, probationes debent esse luce clariores), sehingga kebenaran materiil hukumnya tak terbantahkan,” ucapnya.

Tindakan menuduh seseorang sebagai pelaku pelanggaran HAM berat harusnya memenuhi syarat-syarat dan pembuktian yang tidaklah mudah. Karena itulah, pendekatan yudisial yang telah pernah dilakukan dalam perkara Tanjung Priok, Timor-Timur, Abepura, dan Paniai justru berujung dengan putusan Pengadilan HAM yang membebaskan para terdakwa. Dan putusan pengadilan selalu menimbulkan perdebatan pro-kontra baru.

Sejauh ini, kata Munafrizal, tidak ada putusan hukum yang menyatakan Prabowo Subianto bersalah menurut hukum. Menjadi tidak adil juga menganggap dan memperlakukan seolah-olah telah nyata bersalah menurut hukum. Padahal setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil.

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan isu pelanggaran HAM tersebut bisa menghentikan segala bentuk permusuhan, benih perpecahan dan ujaran kebencian.

“Kita harus senantiasa menjaga perdamaian dan persatuan Republik Indonesia yang sangat besar, sangat kaya, dan sangat indah ini, yang memiliki potensi menjadi negara maju dan makmur pada masa depan,” katanya. ●



tara sebagai seorang presiden.

Prestasi Prabowo Subianto sebagai menteri dengan kinerja terbaik dari hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023, menggambarkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari publik, bahkan angkanya mencapai 91,7 persen.

“Kinerja prabowo sebagai menteri terbaik tentu membawa efek positif,” katanya.

Dia menilai, Prabowo Subianto sudah mumpuni untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi lebih baik lagi. Apalagi Prabowo Subianto ditahbisakan menjadi maskot pemerintah, sehingga sosoknya sangat amanat dan dibutuhkan warga Indonesia sebagai The Next President.

Isu pelanggaran HAM yang terus-menerus mengusik Prabowo Subianto membuat Partai Gerindra geram. Sebab topik tentang pelanggaran HAM itu disebut sebagai isu musiman yang akan menyerang Prabowo Subianto setiap kali mencalonkan diri sebagai capres.

Juru Bicara Partai Gerindra Bidang HAM

imbulkannya menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas. Sehingga semakin menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk menemukan penyelesaian terbaik yang berkeadilan untuk semua.

Pelanggaran HAM yang berat disebutkan merupakan d o -



“Orang birokrat harus tegak lurus, tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan politik lain”



John Wempi Wetipo

PENJABAT BUKAN KEPALA DAERAH DEFINITIF

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan tujuh pejabat kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Keputusan memberhentikan tujuh pejabat kepala daerah dilakukan usai Kemendagri melakukan evaluasi kinerja mereka.

“Kurang lebih ada tujuh (penjabat kepala daerah). Jadi diberhentikan karena dianggap bahwa proses pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan ada yang ikut terlibat politik praktis,” ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, usai pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXX/2023 secara hibrid di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Wempi tidak menjelaskan secara rinci tujuh pejabat kepala daerah dimaksud. Namun, semua pejabat yang diganti ini adalah setingkat kabupaten/kota yang dievaluasi sejak dilantik mulai 2022.

Wempi menegaskan, pejabat kepala daerah adalah seorang birokrat yang ditugaskan menjalankan pemerintahan sementara hingga kepala daerah definitif

terpilih. Karena itu, seorang pejabat tidak boleh memiliki kepentingan politik dalam menjalankan tugasnya.

“Jadi kami benar-benar awasi ini agar tidak terkesan aparaturnya sekarang (ada kepentingan). Kan yang lalu terpilih orang politik. Kalau sekarang kan ditunjuk orang birokrat. Orang birokrat harus tegak lurus, tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan politik lain,” ujar Wempi.

Sementara itu, untuk penunjukan pejabat untuk daerah yang masa jabatannya kepala daerahnya habis September, saat ini sudah dibuat daftar oleh Kemendagri dan disampaikan ke masing-masing daerah. Nantinya, masing-masing daerah mengajukan usulan nama-nama pejabat dan akan melalui proses sidang pra-TPA sebelum diusulkan ke Presiden Joko Widodo.

Saat ini, ada beberapa daerah, di antaranya 17 provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang habis September mendatang. Namun, usulan namanya belum masuk ke Kemendagri.

“Belum ada, baru kami sampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD kabupaten kota provinsi yang akan berakhir itu untuk usulkan nama,” ujarnya.

Karena itu, Wempi tidak dapat memastikan nantinya sosok yang akan mengisi kursi Jateng dan Jabar satu untuk sementara. “Itu yang kami tunggu usulan dari DPR masing-masing gitu. Itu yang kami tunggu kan dari DPRD masing-masing,” ujarnya.

Dia mengatakan salah satu syarat pejabat kepala daerah adalah tidak memiliki catatan buruk dalam rekam jejaknya. Dia

juga mengamini bahwa tentunya ada tenggat waktu untuk memasukan nama-nama pejabat yang akan menggantikan posisi kosong di tingkat gubernur nantinya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pejabat kepala daerah harus bersikap netral dalam menghadapi kontestasi Pemilu maupun Pilkada 2024. Hal ini, kata Tito, karena pejabat kepala daerah adalah seorang birokrat yang bertugas mengisi kekosongan menjalankan pemerintahan daerah.

“Saya mau tekankan di sini kalau (kepala daerah) definitif wajarlah kader partai, yang pejabat ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan,” ujar Tito usai menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) XV/2023 dan APKA-SI Otonomi Expo 2023 di BSD, Kamis, 20 Juli 2023.

Karena itu, dia meminta pejabat dapat memposisi-

kan dirinya sebagai orang netral dalam Pemilu. Hal ini penting untuk menjaga kondusifnya pelaksanaan tahapan Pemilu hingga hari pencoblosan.

“Saya minta betul-betul mengambil posisi netral tidak berafiliasi pada partai manapun atau calon siapapun.

Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik. Ini ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung,” ujarnya.●



Guru dan Dosen Rawan Dipolitisasi

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) khawatir terjadinya politisasi guru dan dosen dalam jumlah masif pada gelaran Pemilu dan Pilkada 2024. Kekhawatiran itu berkaca dari pengalaman pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Komisioner KASN, Arie Budiman, mengatakan, fakta adanya politisasi guru terlihat pada data KASN dalam Pilkada Serentak 2020. Pelaku pelanggaran netralitas ASN paling banyak adalah ASN dengan jabatan fungsional, yakni 26,5 persen dari total seluruh pelanggaran.

“Di antara jabatan fungsional tersebut, maka kelompok jabatan guru dan dosen adalah yang terbanyak melakukan pelanggaran (70 persen) dibandingkan jabatan fungsional lainnya,” kata Arie, Kamis, 27 Juli 2023.

Menurut Arie, pelanggaran netralitas oleh guru dan dosen dalam jumlah besar bisa kembali ter-

jadi dalam pesta demokrasi 2024. Sebab, kelompok ASN ini punya daya tarik dari sisi kuantitas maupun kualitas bagi para kontestan untuk mendulang suara.

Dari sisi kuantitas, jumlah guru dan dosen terbilang besar, yakni 4.559.390 orang di seluruh Indonesia pada 2022/2023. Sedangkan dari sisi kualitas, guru dan dosen punya kemampuan dan akses yang bisa dimanfaatkan sebagai pengepul suara.

Salah satu kemampuan dan akses itu adalah interaksi guru dan dosen dengan para siswa atau mahasiswa yang sudah punya hak pilih. Berdasarkan data KPU, 46.800.161 pemilih Pemilu 2024 adalah generasi Z atau yang lahir pada 1997-2012.

“Sebagian besar generasi Z ini kini berada dalam fase menempuh pendidikan pada jenjang S e k o l a h

Menengah Lanjutan Atas dan perguruan tinggi,” kata Arie.

Guru dan dosen juga kerap dipandang memiliki citra terpuji di mata publik. Para dosen dan guru juga kerap aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya.

Selain itu, guru dan dosen punya kompetensi keilmuan yang dapat digunakan untuk membuat kajian, riset dan rekomendasi kebijakan. Produk akademis tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh politisi untuk kepentingannya.

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang mendorong guru dan dosen melakukan pelanggaran netralitas. Pertama, faktor ikatan persaudaraan antara guru dan dosen dengan kontestan pemilu.

Kedua, adanya kepentingan pragmatis pada sebagian kalangan guru untuk berpindah ke jabatan struktural pada Dinas Pendidikan atau perangkat daerah lainnya. Karena itu, mereka mencoba untuk memenangkan salah satu kontestan.

“Sementara di kalangan dosen, ada keinginan untuk mendapatkan posisi pada struktural kampus atau jabatan lain yang tersedia di luar kampus, baik pada struktur

pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.

Dia menambahkan, faktor pendorong guru dan dosen tidak netral juga disebabkan oleh mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh pejabat struktural atau kepala sekolah.

Berkaca dari faktor-faktor tersebut, Arie mengingatkan para guru dan dosen untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024, apalagi menjadi bagian dari tim sukses seorang kontestan.

Sebab, tindakan tersebut tak hanya melanggar peraturan, tapi juga merusak suasana sekolah dan kampus seharusnya menjadi ruang bagi peserta didik menerima cakrawala ilmu yang rasional dan bebas dari kepentingan.

“Sekolah dan kampus hendaknya tidak dijadikan wadah propaganda berbasis sentimen politik tertentu. Diskusi politik di wilayah kampus hendaknya terbuka untuk semua kontestan dan tidak memberi privilese pada kepentingan politik tertentu,” kata Arie.

Arie juga mewanti-wanti bahwa guru dan dosen yang pernah disanksi akibat pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi lebih berat apabila melakukan pelanggaran serupa dalam Pemilu dan Pilkada 2024.●





“Kita memperjuangkan agar kepentingan terbaik NKRI, khususnya di bidang ekonomi bisa tercapai”

Sandiaga Uno

INFO

EKSEKUTIF

21

Minggu 1 • Agustus 2023

FOKUS GARAP EKONOMI BUKAN DIRI SENDIRI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menginginkan kontestasi politik di Indonesia berjalan sejuk dan jauh dari polarisasi yang bisa menghancurkan kerja yang selama ini diupayakan satu bangsa.

hwal pandangannya terhadap tensi politik yang sedang terjadi di Tanah Air menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sandi ingin masyarakat menikmati proses politik yang sedang berjalan tanpa ada permusuhan.

“Saya ingin kita fokusnya itu agar kontestasi di negeri ini aman, sejuk, dan kontestasi demokrasi ini dibawa dengan riang gembira. Jadi, saya menyampaikan bahwa ke depan kita lebih berkolaborasi, warna-warna representasi ini tetap terbangun,” kata Sandiaga usai membuka International Tourism Investment Forum (ITIF) di Badung, Bali, Rabu, 26 Juli 2023.

Saat ini, kata Sandi, dirinya akan tetap fokus untuk terus bekerja sesuai kapasitasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipercayakan Presiden Joko Widodo.

“Saya fokus kepada ekonomi, di mana kita bisa menciptakan lapangan kerja, memastikan ekonomi rumah tangga, dan ongkos-ongkos hidup ini tetap terjaga. Itu yang menjadi fokus pemerintahan ke depan,” katanya.

Sandi juga enggan untuk menyampai-

kan pendapatnya terkait isu pencalonannya yang digadang-gadang menemani Ganjar Pranowo sebagai cawapres pada bursa Pilpres 2024. Dia mengatakan keputusan politik untuk menentukan calon wakil presiden merupakan ranah dari pemimpin partai.

“Bukan pada kapasitasnya untuk menilai diri sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwa pilihan itu ada di tangan pimpinan partai politik. Saya berharap pilihan itu kita berikan penghormatan, sehingga begitu pilihan itu

dijatuhkan, kita memperjuangkan agar kepentingan terbaik NKRI, khususnya di bidang ekonomi bisa tercapai,” ujar Sandi.

Dalam acara tersebut, Sandi mengungkapkan, pascapandemi COVID-19, visitor lebih condong memilih destinasi yang mengedepankan pariwisata yang berkepanjangan lingkungan dan berskala kecil. Karena itu, Sandi membu-juk penanam modal untuk mengedepankan investasi hijau sebagai pilihan utama dalam pengembangan pariwisata berkepanjangan di Indonesia.

“Kita percaya investasi setelah COVID-19 mengedepankan investasi yang personalized, localized, bigger impact but smaller in size. Selain itu, investasi ini merujuk pada investasi hijau dan ini adalah masa depan ekonomi kita,” kata Sandi.

Menurutnya, perihal yang sama juga terjadi pada

tren investasi pariwisata yang bergeser pada investasi pariwisata hijau. Investasi hijau yang dimaksud adalah investasi yang mengedepankan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sektor pariwisata dan tren ini bakal terus bersambung di masa mendatang.

Selain itu, berdasar info yang dia peroleh, pada 2022, Indonesia memperoleh biaya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di sektor pariwisata sebesar USD225,28 miliar dan investasi langsung domestik (Domestic Direct Investment) sebesar USD577,87 miliar. Lalu, pada kuartal pertama 2023, Indonesia memperoleh investasi sebesar USD803,15 miliar.

Sandi berambisi ITIF menjadi arena untuk berbagi pengalaman dan buah pikiran antara penanam modal dengan para stakeholder dalam rangka pengembangan pariwisata berkepanjangan di Indonesia. Terlebih, Indonesia mempunyai kelebihan perihal kekayaan alam dan budaya.

Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19, Kemenparekraf mengembangkan protokol CHSE (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) sebagai upaya meningkatkan kepercayaan visitor dan penanam modal untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkepanjangan lingkungan.

“Kita kudu berpikir out of the box dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Karena pariwisata bukanlah suatu masalah, melainkan pariwisata adalah bagian dari solusi (ekonomi) pascapandemi,” katanya.

Selain membuka ITIF 2023, Sandi juga menyaksikan penandatanganan letter of intent (LoI) antara Nimo Enterprise and Mitra Jaya Realty dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). ●



Netralitas ASN Ciri Budaya Pemilu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional dengan bersikap netral dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Salah satu ciri budaya kita dalam pemilu ini adalah netralitas ASN,” tegas Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, pada Webinar Series 7 Korpri Menyapa (Komen) bertajuk Partisipasi Sosial ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Rabu, 26 Juli 2023.

Suhajar menegaskan, Kemendagri terus mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu salah satunya dalam aspek menjaga netralitas ASN.

Upaya itu seperti melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Surat tersebut mengatur pedoman, pembinaan, dan pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pegawai harus netral, saya sudah bilang tadi dari awal, pegawai negeri harus tumbuh secara profesional dan semua kekuatan di negara ini harus mendorong tumbuhnya profesionalitas pegawai negeri,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 2 UU 5/2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Suhajar menegaskan, ASN yang tidak netral bakal dicatat oleh KASN. Kemendagri

juga turut mengontrol netralitas ASN seluruh Indonesia.

Kendati demikian, ASN di daerah terpencil dapat membantu penyelenggaraan pemilu dengan menjadi bagian dari sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Suhajar menjelaskan, netralitas ASN dibutuhkan untuk memastikan kualitas pelaksanaan birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap terjaga meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

“Kewajiban kita semua untuk menjaga pemilu berjalan dengan benar agar kualitas demokrasi Republik Indonesia ini meningkat,” tegasnya. ●



“Jadi, 31 Desember 2023 merupakan akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang dilantik pada 2019”

Suhajar Diantoro



MENANTI MASA DEPAN KEPALA DAERAH SUMSEL

Tahun 2023 menjadi masa terakhir bagi kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menikmati posisinya sebagai pejabat pemerintahan. Bahkan, tahun ini, ada 10 pasang kepala daerah di Bumi Sriwijaya yang akan lengser karena masa kepemimpinannya sudah habis.

Pada level tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya sudah harus turun tahta per 1 Oktober 2023.

Ada banyak perubahan yang dilakukan pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya selama memimpin Sumsel. Salah satunya program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang sudah digalakkan selama beberapa tahun. Berkat GSMP, Sumsel dinobatkan menjadi salah satu provinsi terbaik secara nasional dalam menurunkan angka stunting.

Prevalensi stunting di Sumsel berhasil turun drastis dari 24,8 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen di 2022 atau turun sekitar 6,2 persen. Atas keberhasilan yang mereka klaim ini, HDMY rencananya kembali maju di Pilkada 2024.

Di tingkatan kota/kabupaten, Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda juga akan mengakhiri jabatannya pada 18 September 2023.

Selama lima tahun menjabat sebagai kepala daerah, Harnojoyo melakukan banyak perubahan dan kebiasaan masyarakat Palembang. Dia menggalakkan Safari Subuh setiap harinya dengan mengajak para pejabat di jajaran Pemkot Palembang. Dia juga melakukan bersih-bersih drainase di Palembang yang cukup menekan angka polusi sampah yang mengalir ke Sungai Musi.

Pada 2024 mendatang, Harnojoyo akan meningkatkan peruntungannya dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota

DPR RI. Sementara, Fitrianti Agustinda akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang.

Seperti Palembang, masa jabatan Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dan Wakil Wali Kota Sulaiman Kohar juga akan lengser karena masa jabatannya habis per 18 September 2023. Jauh sebelum menjabat jadi Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe mendapat kepercayaan masyarakat sebagai Wakil Wali Kota Lubuklinggau periode 2008-2013.

Pada Pilkada 2013, dia maju sebagai Wali Kota Lubuklinggau didampingi Sulaiman Kohar dan berhasil melenggang menjadi pemenang serta dilantik pada 24 Februari 2013.

Kekompakan mereka pun terus terjaga hingga tetap solid maju di Pilkada 2018 dan kembali menjadi pemenang. Sulaiman Kohar digadang-gadang akan mencoba peruntungan menjadi calon wali kota Lubuklinggau di Pilkada 2024.

Sedangkan, Prana Putra Sohe sudah mantap mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya dan Wakil Wali Kota Andriansyah Fikri juga menjadi pasangan petahana yang sukses menjabat selama dua periode. Namun, pada 18 September 2023 mendatang, jabatan mereka sudah habis.

Pada Pilkada Prabumulih 2018, pasangan Ridho Yahya-Andriansyah Fikri menjadi calon tunggal karena tidak ada satupun yang mendaftarkan diri dan lolos menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Prabumulih.

Belum diketahui secara pasti apa rencana pasangan ini ke depan, apakah akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau maju di Pilgub Sumsel

2024.

Satu lagi kepala daerah di Sumsel yang masa jabatannya habis pada 18 September 2023 adalah Wali Kota Pagaram Alpian Maskoni dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadli.

Namun kabar duka menyelimuti warga Kota Pagaram karena Wakil Wali Kota Muhammad Fadli tutup usia pada 7 Desember 2022 di usia 37 tahun setelah 4 tahun menjabat. Pria kelahiran 17 November 1985 ini meninggal dunia setelah dirawat intensif di RS Siti Fatimah Palembang. Sebelum tutup usia, dia sempat mengeluhkan sakit dada setelah bermain bulu tangkis.

Di tingkat kabupaten, ada tiga pasangan kepala daerah yang juga harus mengakhiri masa jabatannya pada 18 September 2023. Yakni Bupati Banyuasin Askolani dan Wakil Bupati Slamet Somosentono, Bupati Empat Lawang Jonck Muhammad dan Wakil Bupati Yulius Maulana, dan Bupati Lahat Cik Ujang dan Wakil Bupati Haryanto.

Bupati-Wakil Bupati Muara Enim yang dijabat secara tunggal oleh Ahmad Usmarwi Kaffah juga akan berakhir pada 18 September 2023. Jabatan Usmarwi disebut sebagai kursi panas karena dia menggantikan Bupati-Wabup Muara Enim yang terjerat kasus korupsi dan meninggal dunia.

Pada Pilkada 2018, sebenarnya pasangan Ahmad Yani -Juarsah yang menang dan resmi dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati Muara Enim pada 18 Sep-

tember 2018. Tak sampai setahun memimpin, Bupati Muara Enim Ahmad Yani terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di September 2019 karena dugaan menerima suap proyek di lingkungan Dinas PUPR Muara Enim.

Gubernur Sumsel Herman Deru langsung melantik Wabup Muara Enim Juarsah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim. Sayangnya, jabatannya itu hanya bertahan selama 1,5 tahun. Dia menyusul Ahmad Yani menjadi pesakitan KPK dengan kasus yang sama di 2019.

Karena dua jabatan kosong, Gubernur Sumsel langsung melantik Plh Bupati Muara Enim yang diisi oleh Sekda Sumsel Nasrun Umar. Pada 2021, Nasrun Umar kembali dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim hingga 11 Mei 2022.

Jabatan Plh Bupati Muara Enim selanjutnya dipercayakan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel, Kurniawan pada 12 Mei 2022 dan dilantik kembali menjadi penjabat Bupati Muara Enim pada Agustus 2022.

DPRD Muara Enim akhirnya menggelar Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Muara Enim di awal September 2022 untuk mengisi sisa masa jabatan Wakil Bupati Muara Enim.

Dari dua nama calon wakil bupati Muara Enim, akhirnya Ahmad Usmarwi Kaffah yang diusung Partai Demokrat yang terpilih. Ahmad Usmarwi Kaffah dilantik sebagai Wabup Muara Enim sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada 25 Januari 2023.

Dari pelantikan hingga masa jabatannya habis, Ahmad Usmarwi Kaffah hanya menjadi kepala daerah selama 8 bulan dan diperkirakan akan kembali bertarung di Pilkada Muara Enim 2024.

Mundur Sebelum Usai

Jika masa jabatan sembilan kepala daerah di Sumsel lainnya akan berakhir di September-Oktober 2023, berbeda dengan kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel yang dijabat oleh Bupati Iskandar dan Wakil Bupati Djakfar Shodiq.

Mereka resmi dilantik pada 15 Januari 2019 dan jabatannya baru akan habis pada 15 Januari 2024. Namun, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran untuk menjelaskan tentang itu dalam Surat Nomor 100.2.1.3/1775/OTDA yang dikeluarkan pada 27 Maret 2023. ●





“Memang caleg-caleg baru ini adalah anak-anak pejabat. Ini cukup kuat mendongkrak suara mereka”

Arianto

SUARA PETAHANA ANJLOK CALEG BARU KIAN BERSINAR

Bursa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan diramaikan dengan wajah-wajah lama maupun wajah baru untuk mendapatkan kesempatan melenggang ke Senayan.

Beberapa calon legislatif (caleg) petahana asal Sumatera Selatan kemungkinan akan kembali berlaga merebut kepercayaan masyarakat demi mempertahankan posisinya sebagai wakil rakyat di DPR.

Adapun petahana DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumsel antara lain Eddy Santana Putra dari Partai Gerindra (anggota Komisi V), Riezky Aprilia dari PDIP (anggota Komisi IV), Kahar Muzakir dari Partai Golkar (Badan Musyawarah), Fauzi Amro dari Partai Nasdem (Komisi XI - Kapoksi), Mustafa Kamal dari PKS (anggota Komisi X), Achmad Hafisz Tohir dari PAN (anggota Komisi XI), dan Ishak Mekki dari Partai Demokrat (anggota Komisi V).

Sementara, Dapil II ada Bertu Merlas dari PKB (anggota Komisi XI), Sri Meliyana dari Partai Gerindra (anggota Komisi IX), Yulian Gunhar dari PDIP (Kapoksi Komisi XII), Bobby Adhityo Rizaldi dari Partai Golkar (anggota Badan Anggaran), Irma Suryani dari Partai Nasdem (Kapoksi BURT), Sri Kustina dari Partai Nasdem (anggota Komisi IV), Hanna Gayatri dari PAN (anggota Komisi V), dan Wahyu Sanjaya dari Partai Demokrat (anggota Komisi II).

Namun mereka juga harus siap menghadapi para caleg baru yang mempunyai track record baik di Sumsel dan dikenal luas oleh masyarakat serta berasal dari generasi milenial.

Di Dapil I ada nama yang mendominasi perpolitikan Sumsel seperti Anita Noerenghati dari Partai Golkar yang kini menjabat Ketua DPRD Sumsel. Lalu, Renny Astuti, mantan anggota DPR Komisi IV yang kini dengan Partai Nasdem, dan menantu Gubernur Herman Deru, Muhammad Yaser dari Partai Nasdem.

Kepala daerah di Sumsel pun tak mau kalah. Mereka juga mendaftarkan diri menjadi wakil rakyat. Wali Kota Palembang Harnojoyo siap membawa Partai Demokrat memenangkan kursi DPR dan Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe juga mendaftarkan diri sebagai caleg DPR Dapil Sumsel I dari PKB.

Di Dapil 2 DPR ada nama mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji dengan PKB, Wakil Ketua DPRD Sumsel Sumsel Giri Ramandha M Kiemas dari PDIP, serta Mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol (Purn) Zulkarnain Adinegara dari Partai Perindo.

Lalu ada pula anak-anak pejabat yang turut meramaikan bursa caleg DPR, yakni Samantha Tivani putri Gubernur Herman Deru dari Partai Nasdem dan AW Noviadi anak Wakil Gubernur Mawardi Yahya dari Partai Gerindra. Mereka berdua digadagadag sebagai perwakilan dari generasi milenial yang bisa membawa perubahan baru di Senayan.

Dari hasil survei Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) selama setahun terakhir, pamor caleg petahana kian menurun. Hal itu berbanding terbalik dengan wajah-wajah caleg baru yang mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Sumsel.

Direktur Eksekutif LKPI, Arianto, mengatakan, ada kecenderungan pamor caleg petahana melemah. Apalagi warga kehilangan dua sosok pentolan Sumsel, yakni Alex Noerdin yang terjerat kasus korupsi dan berputusnya Percha Leanpuri, anak Gubernur Herman Deru.

Peserta survei menilai, caleg petahana tidak bersentuhan langsung ke

masyarakat, tidak memperlihatkan kinerjanya terutama di media sosial dan akhirnya pamor mereka semakin menurun.

Tingkat kepuasan kinerja caleg petahana hanya sekitar 55-60 persen, angka yang tidak begitu memuaskan. Apalagi caleg petahana terkesan hanya menyibukkan diri di Senayan, tanpa mengingat daerah asalnya.

Namun hal tersebut tidak berpengaruh ke beberapa caleg petahana ini. Seperti hasil tingkat kepuasan masyarakat ke sosok Eddy Santana Putra yang masih cukup gemilang. Mantan Wali Kota Palembang itu cukup tenar di kalangan masyarakat Sumsel dan mampu mewakili aspirasi warganya.

“Potensi kembalinya Eddy Santana Putra ke senayan cukup besar. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya juga baik. Lalu, Bobby Adhityo Rizaldi dari Partai Golkar dan Wahyu Sanjaya dari Partai Demokrat juga berpotensi besar menang. Berbeda dengan caleg petahana lainnya yang kian tergerus,” katanya.

Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat Sumsel tersebut membuat nama-nama caleg Dapil I dan II berpotensi menggeser posisi caleg petahana. Salah satunya AW Noviadi yang mempunyai tarikan elektoral yang kuat.

Ofi dikenal dari masyarakat kelas bawah saat dia menjadi anggota DPRD Ogan Ilir dan menjadi Bupati Ogan Ilir walaupun hanya 28 hari. Sosialisasinya begitu mengena ke bawah dibandingkan caleg-caleg petahana, bahkan di kalangan generasi milenial.

Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba saat dia dipecat menjadi Bupati Ogan Ilir pada 2016 tak membuat kepercayaan masyarakat ke Ofi luntur. Bahkan, masyarakat Sumsel terkesan sudah melupakan kasus itu, karena sosok Ofi yang mampu merebut hati warganya.

Jika di-breakdown, modal sosial dan politiknya sudah begitu mengakar dan AW Noviadi juga dikenal dengan sikapnya yang ramah. Itulah yang tertanam di masyarakat, sehingga warga tidak peduli lagi dengan kasus lamanya.

Lalu, Samantha Tivani, anak Gubernur Herman Deru juga dievaluasi bisa mewakili generasi milenial di DPR. Tingkat elektabilitas ayahnya membuat Samantha

berpeluang besar menjadi pemenang di Pileg 2024.

“Memang caleg-caleg baru ini adalah anak-anak pejabat. Ini cukup kuat mendongkrak suara mereka. Kita tidak bisa pungkiri, nama besar orang tuanya sangat berpengaruh untuk meraih kemenangan. Terutama nama Herman Deru sangat kuat tarikan elektoralnya,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel Anita Noerenghati pun cukup mumpuni memenangkan suara di Pileg 2024. Mewakili aspirasi perempuan, Anita mempunyai power lebih untuk bisa menggeser caleg petahana. Wakilnya, Giri Ramandha M Kiemas juga tak kalah tenar. Ketua PDIP Sumsel ini juga digadagadag akan memenangkan persaingan Pileg 2024.

Secara partai, PDIP menduduki posisi pertama dan kedua, potensi mendapatkan minimal satu suara itu pasti. Apalagi melihat sosok Giri Ramandha M Kiemas, banyak peserta survei yang mendukung keponakan mendiang Taufik Kiemas ini.

Kendati banyak penurunan tingkat kepercayaan masyarakat Sumsel ke caleg petahana, namun para wakil rakyat asal Sumsel tersebut bisa kembali meraih hati warganya. Salah satunya dengan memanfaatkan sisa waktu 7 bulan ke depan sebelum Pileg 2024 dimulai.

Arianto mengatakan, anggota DPR Sumsel jangan terlampaui menyibukkan diri di Senayan, harus memberi ruang dan waktu untuk menyapa warganya. Jangan sampai para caleg petahana hanya mendekati diri ke masyarakat ketika dekat pemilu.

Jika dalam 7 bulan terakhir mereka sudah mulai mendekati lagi ke masyarakat, kemungkinan besar peluang untuk kembali jadi wakil rakyat bisa diraih, minimal satu kursi untuk mereka. Tapi jika sosialisasi dilakukan hanya 2-3 bulan jelang Pileg 2024, persaingan akan kian ketat. Terlebih caleg-caleg baru akan lebih menggencarkan sosialisasi ke masyarakat, yang membuat posisi caleg petahana semakin terdesak.

Giri Ramandha Kiemas menilai luasan wilayah dapil di Sumsel serta jarak antara Sumsel dan Jakarta menjadi faktor caleg petahana kurang dianggap dikenal masyarakat. Selain itu, anggota DPR memang bukan seperti kepala daerah yang harus dikenal semua masyarakat.

Mereka sudah memahami berapa banyak suara yang dibutuhkan agar tetap duduk di Senayan, sehingga hanya menjaga basis-basis suaranya.

Dia menegaskan, Pileg berbeda dengan Pilkada. Persaingannya bukan saja di eksternal, tapi juga di internal partai. Peluang bacaleg tersebut lolos seleksi dari DPP PDIP, tergantung dari kejelian dari para calegnya.

Jika para bacaleg jeli membaca lapangan, tentunya akan menjadi peluang besar menjadi wakil partai untuk bersaing di Pileg 2024. Termasuk jika tidak bisa membaca dan memanfaatkan peluang, keinginan untuk menjadi caleg Pileg 2024 mendatang akan sulit didapatkan. ●



“Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu disebut-sebut berdiri dengan dua kaki, namun kini kedua kaki Jokowi nampaknya cenderung total mendukung Prabowo”

Gema Nusantara Bakry



PRABOWO MAKIN MENDOMINASI BERKAT ENDORSE JOKOWI

Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden (Capres) 2024. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo Subianto yang paling tinggi.

LSN membuat survei ini dalam beberapa format. Dalam format pertanyaan terbuka, Prabowo Subianto berada di posisi paling atas.

Ketika LSN mengajukan pertanyaan secara terbuka (top of mind) siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres, sebanyak 28,5 persen secara spontan menyebut nama Prabowo Subianto. Sementara yang menyebut nama Ganjar Pranowo sebanyak 17,6 persen dan Anies Baswedan hanya 13,4 persen.

LSN juga mengajukan pertanyaan secara tertutup, di mana Prabowo Subianto tetap kokoh di puncak dengan elektabilitas 33,8 persen. Sedangkan, Ganjar hanya dipilih oleh 20,2 persen dan Anies menjadi pilihan 16,4 persen responden.

Posisi Prabowo juga tetap di atas saat simulasi tiga nama. Prabowo semakin menguat dengan elektabilitas 40,5 persen. Sementara Ganjar hanya didukung oleh 30,8 persen dan Anies menjadi pilihan 22,4 persen responden.

Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, mengungkap posisi Prabowo menguat lantaran endorsement dari Presiden Jokowi yang disebut total mendukung Menteri Pertahanan itu.

“Salah satu faktor penyebab mengapa trend elektabilitas Prabowo Subianto semakin menguat, sementara Ganjar Pranowo cenderung melemah adalah faktor endorsement Presiden Jokowi. Berdasarkan observasi LSN, Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu disebut-sebut berdiri dengan dua kaki, namun kini kedua kaki Jokowi nampaknya cenderung total mendukung Prabowo,” ungkap Gema dalam rilis survei LSN, Rabu, 26 Juli 2023.

Gema menjelaskan, relawan Presiden Jokowi disebut-sebut bakal menentukan capres dan cawapres yang akan menang di Pemilu 2024. Namun, hingga kini relawan Presiden Jokowi itu belum juga menyatakan secara gamblang arah dukungan bakal capres yang akan maju.

Hasil survei LSN menunjukkan, sebanyak 47,5 persen responden yang mengaku pemilih atau relawan Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto.

Sedangkan, sebanyak 35,8 persen responden yang mengaku pemilih atau relawan Presiden

Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo. Hanya 8,9 persen responden yang mengaku pemilih atau relawan Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan.

Dia menyebut bahwa persentase basis massa dan relawan Jokowi yang hijrah mendukung Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei LSN sebelumnya.

“Sementara yang tetap setia atau bertahan mendukung Ganjar Pranowo cenderung mengalami penurunan,” ujarnya.

Survei LSN pada Juni mencatat, sebanyak 45,6 persen responden yang mengaku pemilih atau relawan Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto, disusul 40,3 persen lainnya memilih Ganjar Pranowo, dan 8,5 persen sisanya memilih Anies Baswedan.

Hasil survei LSN kali ini juga menemukan bahwa lebih dari 38,8 persen konstituen PDIP bermigrasi ke Prabowo Subianto. Lalu, 45,3 persen konstituen PDIP lainnya tetap bertahan di kubu Ganjar Pranowo, dan 9,1 persen konstituen PDIP memilih Anies Baswedan.

“Memang persentase konstituen atau pemilih PDIP yang mendukung Ganjar masih lebih besar daripada yang bermigrasi ke Prabowo. Namun, berdasarkan temuan survei LSN, dalam setahun terakhir persentase konstituen PDIP yang memilih Ganjar terus menurun,” katanya.

Menurut dia, banyaknya konstituen PDIP yang mengalihkan dukungannya ke Prabowo lantaran faktor “Jokowi Effect”, serta banyak di antaranya yang merasa lebih nyaman bernaung di bawah panji Prabowo.

“Pernyataan secara terbuka untuk mendukung Prabowo dari sejumlah elite PDIP belum lama ini mengindikasikan bahwa banyak dari mereka yang sudah kurang nyaman berada di gerbong politik yang

dikomandani oleh Megawati Soekarnoputri,” ucap dia.

Selain itu, hasil survei LSN juga menunjukkan 45,3 persen publik meyakini Prabowo Subianto kemungkinan besar mendapatkan dukungan (endorsement) Presiden Jokowi menjadi bakal capres 2024-2029. Dia menyebut keyakinan publik bahwa Prabowo akan di-endorse Presiden Jokowi bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara itu, sebanyak 30,2 persen publik meyakini bahwa Ganjar Pranowo yang kemungkinan besar akan mendapatkan endorsement dari Jokowi untuk menjadi bakal capres periode mendatang.

“Keyakinan publik bahwa Ganjar lah yang akan mendapatkan endorsement justru terus menurun, saat ini tinggal 30,2 persen publik yang meyakini bahwa Ganjar akan di-endorse oleh Jokowi untuk menjadi Presiden RI,” ujarnya.

Hasil survei mencatat bahwa secara berturut-turut tokoh nasional lainnya yang kemungkinan besar akan mendapatkan endorsement Presiden Jokowi untuk menjadi bakal capres

ialah Erick Thohir sebanyak 8,4 persen, dan Mahfud MD sebanyak 6,2 persen. Adapun 5,5 persen publik menjawab tokoh lainnya, serta 4,4 persen sisanya menjawab tidak tahu.

Survei LSN ini mencatat bahwa tingkat kepuasan

publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami peningkatan dibandingkan survei LSN sebelumnya pada Juni 2023, di mana sebanyak 75,6 persen responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. “Dan hanya 22,3 persen yang mengaku kurang atau tidak puas,” ucapnya.

Menurut dia, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini berpengaruh pada approval rating Jokowi dan pada gilirannya akan berpengaruh pada konstelasi persaingan elektabilitas tiga capres papan atas.

Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Prabowo Subianto juga tercatat unggul atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada simulasi 34 nama, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 31,6 persen, unggul 0,2 persen dari Ganjar Pranowo. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 17,6 persen dan kemudian di posisi keempat terdapat nama Ridwan Kamil sebanyak 4,0 persen.

Dalam simulasi 19 nama, Prabowo mendapatkan tambahan suara sehingga elektabilitasnya menjadi sebesar 33,4 persen, sementara Ganjar cenderung stagnan dengan hanya memiliki elektabilitas sebesar 31,5 persen. Anies Baswedan justru menurun di level 17,4 persen.

Pada simulasi 10 nama tertutup, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 33,5 persen, Ganjar 32,8 persen, dan Anies Baswedan tetap berada di posisi ketiga dengan 17,8 persen.

Sedangkan untuk simulasi tiga nama capres, elektabilitas Prabowo berada di level 36,8 persen, unggul dari Ganjar yang ada di posisi kedua dengan 35,7 persen dan Anies di posisi ketiga dengan 17,8 persen. Dalam simulasi terakhir ini, jumlah responden yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan pun turun menjadi 6,1 persen saja. ●

